


EVALUASI PUBLIK ATAS KINERJA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN PERPAJAKAN

Temuan Survei:
20 – 24 Juni 2023

The logo for 'INDIKATOR' features the word in a bold, black, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a stylized circular icon with a teal center and a red arrow pointing towards the top right. A thick red horizontal bar is positioned above the logo.

INDIKATOR

Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Pusat
Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867
Website: www.indikator.co.id

A thick red horizontal bar is located at the bottom of the page, below the contact information.

PENGANTAR

- Hukum merupakan salah satu pilar dalam negara demokrasi. Hukum yang ditegakkan secara adil dan konsisten memberi sinyal tentang penerapan norma dan prosedur di masyarakat, dan lebih jauh, menunjukkan adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lembaga dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam penegakan hukum. Kinerja lembaga dan aparat yang memuaskan akan menumbuhkan kepercayaan publik, tidak hanya kepada para penegak hukum, akan tetapi juga kepada pemerintahan yang sedang berjalan dan demokrasi secara keseluruhan.
- Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus hukum besar menjadi sorotan publik. Menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi dan menimbulkan kerugian negara amat besar hingga melukai rasa keadilan. Kasus korupsi BTS yang melibatkan menteri di Kabinet Joko Widodo yang juga politikus Partai NasDem Johnny G. Plate yang disebut merugikan negara sekitar Rp 8 triliun. Kasus lain adalah penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang disangkakan kepada pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, pembunuhan anggota kepolisian yang melibatkan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo juga menjadi sorotan publik.

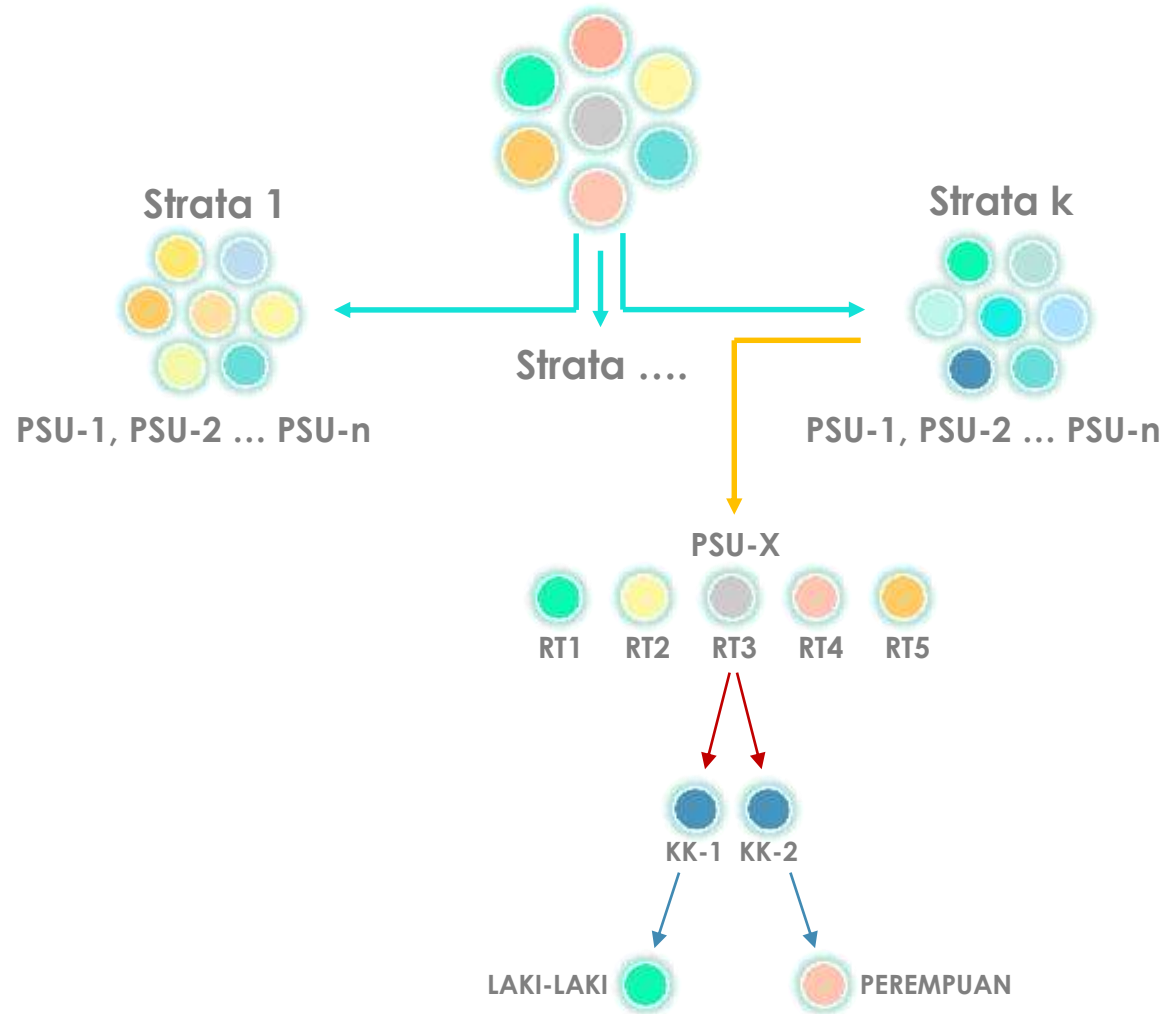
PENGANTAR

- Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi ujian bagi para penegak hukum, khususnya Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Publik memperhatikan penanganan kasus-kasus tersebut. Penanganan yang buruk akan berakibat pada menurunnya kepercayaan publik pada lembaga dan aparat, yang selanjutnya mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah dan demokrasi. Sebaliknya, penanganan yang adil akan meningkatkan kepercayaan publik.
- Untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap kasus-kasus hukum besar tersebut, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik secara nasional. Survei mengungkap pandangan publik terhadap kasus sekaligus kepercayaan publik khususnya kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Selain itu, survei juga menanyakan kepercayaan terhadap insitusi demokrasi lainnya. Kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo serta evaluasi terhadap kondisi nasional juga digali dalam survei.
- Hasil survei dapat memberi gambaran tentang potret kepercayaan publik terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia. Informasi dalam survei juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan peningkatan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten.

METODE

- Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
- Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%.
- Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
- Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL



Populasi desa/kelurahan (PSU).

Desa/kelurahan (PSU) di tiap strata dipilih secara random dengan jumlah proporsional.

Di setiap PSU terpilih, dipilih sebanyak 5 RT (satuan lingkungan terkecil di atas KK) dengan cara random.

Di masing-masing RT/Lingkungan terpilih, dipilih secara random dua KK.

Di tiap KK terpilih, dipilih secara random satu orang yang punya hak pilih, laki-laki/perempuan.

VALIDASI SAMPEL

VALIDASI SAMPEL

	SAMPEL	POPULASI
GENDER		
Laki-laki	49.5	50.0
Perempuan	50.5	50.0
DESA/KOTA		
Pedesaan	49.8	50.2
Perkotaan	50.2	49.8
USIA		
<= 20 tahun	9.8	10.3
21-25 tahun	12.5	12.5
26-30 tahun	13.2	13.5
31-35 tahun	11.9	12.0
36-40 tahun	11.7	11.6
41-45 tahun	10.0	9.8
46-50 tahun	8.6	8.6
51-55 tahun	6.5	6.6
56-60 tahun	5.3	5.1
> 60 tahun	10.4	10.1

	SAMPEL	POPULASI
PENDIDIKAN		
<= SD	36.9	37.0
SLTP	18.5	18.0
SLTA	30.9	31.2
Kuliah	13.7	13.7
AGAMA		
Islam	87.0	87.2
Protestan/Katolik	10.0	9.9
Lainnya	3.0	3.0
ETNIS		
Jawa	40.3	40.2
Sunda	16.0	15.5
Batak	3.6	3.6
Madura	3.2	3.0
Betawi	3.0	2.9
Minang	2.9	2.7
Bugis	2.5	2.7
Melayu	2.4	2.3
Lainnya	26.2	27.1

VALIDASI SAMPEL

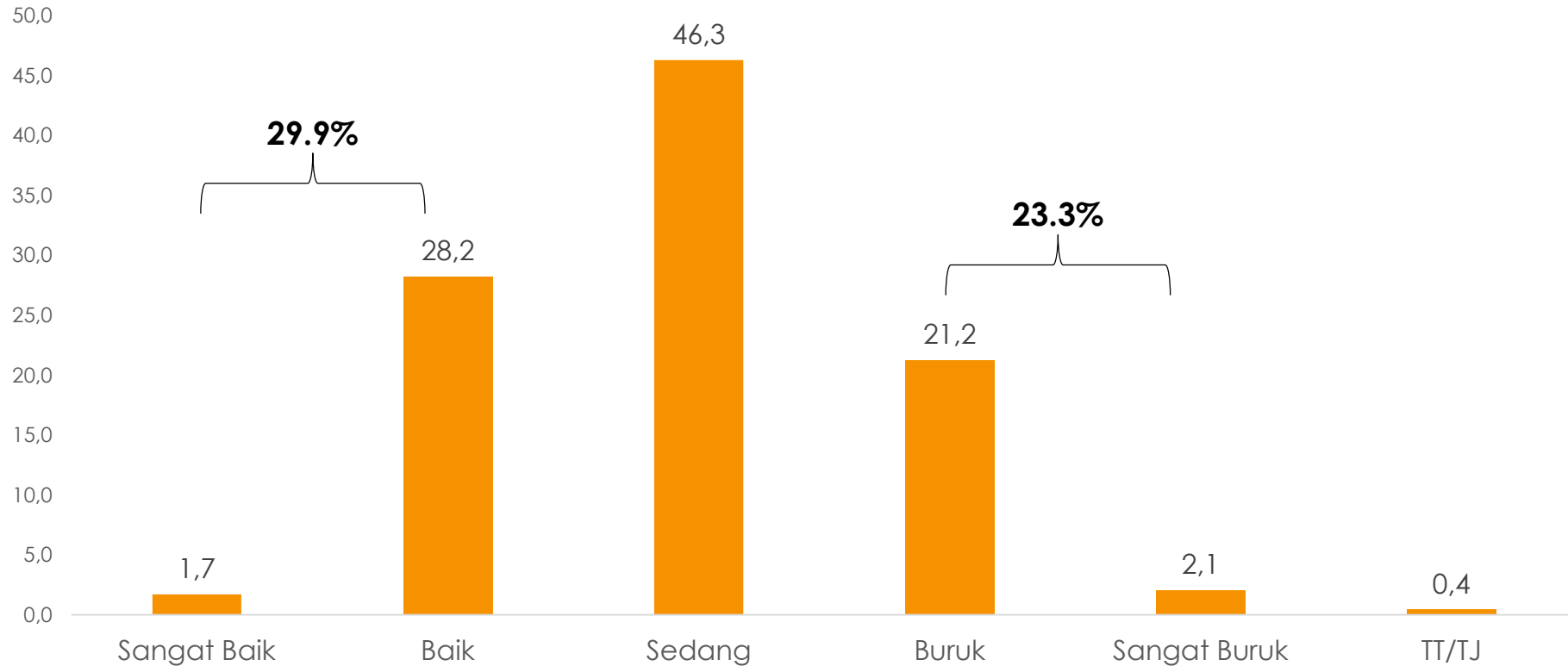
	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
ACEH	1.8	1.8
SUMATERA UTARA	5.1	5.1
SUMATERA BARAT	1.9	1.9
RIAU	2.0	2.0
JAMBI	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.1	3.1
BENGKULU	0.7	0.7
LAMPUNG	3.2	3.2
BANGKA BELITUNG	0.5	0.5
KEPULAUAN RIAU	0.6	0.6
DKI JAKARTA	4.1	4.1
JAWA BARAT	17.4	17.4
JAWA TENGAH	14.6	14.6
DI YOGYAKARTA	1.4	1.4
JAWA TIMUR	16.2	16.2
BANTEN	4.3	4.3
BALI	1.6	1.6

	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
NUSA TENGGARA BARAT	1.9	1.9
NUSA TENGGARA TIMUR	1.8	1.8
KALIMANTAN BARAT	1.9	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.9	0.9
KALIMANTAN SELATAN	1.5	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.3	1.3
KALIMANTAN UTARA	0.2	0.2
SULAWESI UTARA	1.0	1.0
SULAWESI TENGAH	1.0	1.0
SULAWESI SELATAN	3.2	3.2
SULAWESI TENGGARA	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.5
MALUKU	0.7	0.7
MALUKU UTARA	0.4	0.4
PAPUA BARAT	0.4	0.4
PAPUA	1.9	1.9

KONDISI UMUM

KONDISI EKONOMI NASIONAL

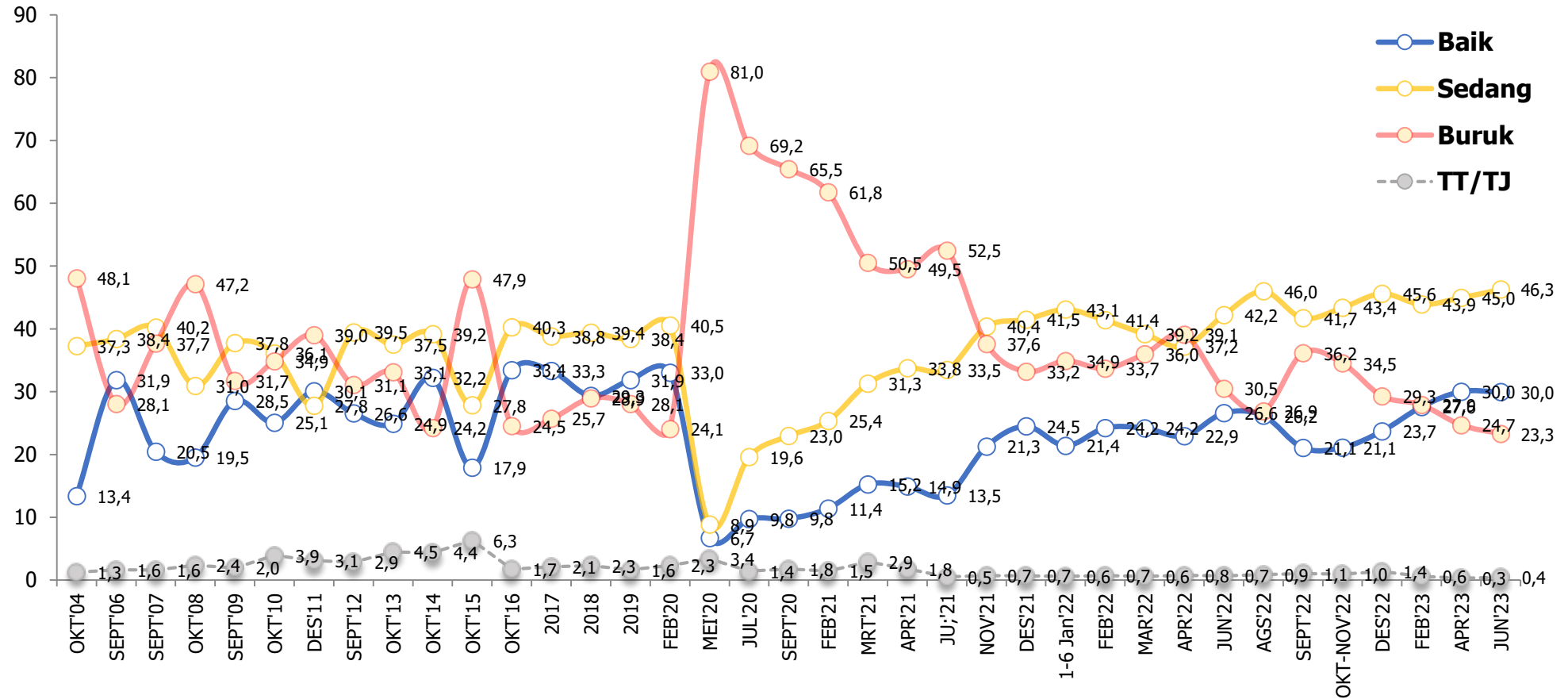
Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? ... (%)



Lebih banyak yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini sedang, sementara yang menilai baik sedikit lebih tinggi ketimbang yang menilai buruk.



TREN KONDISI EKONOMI NASIONAL

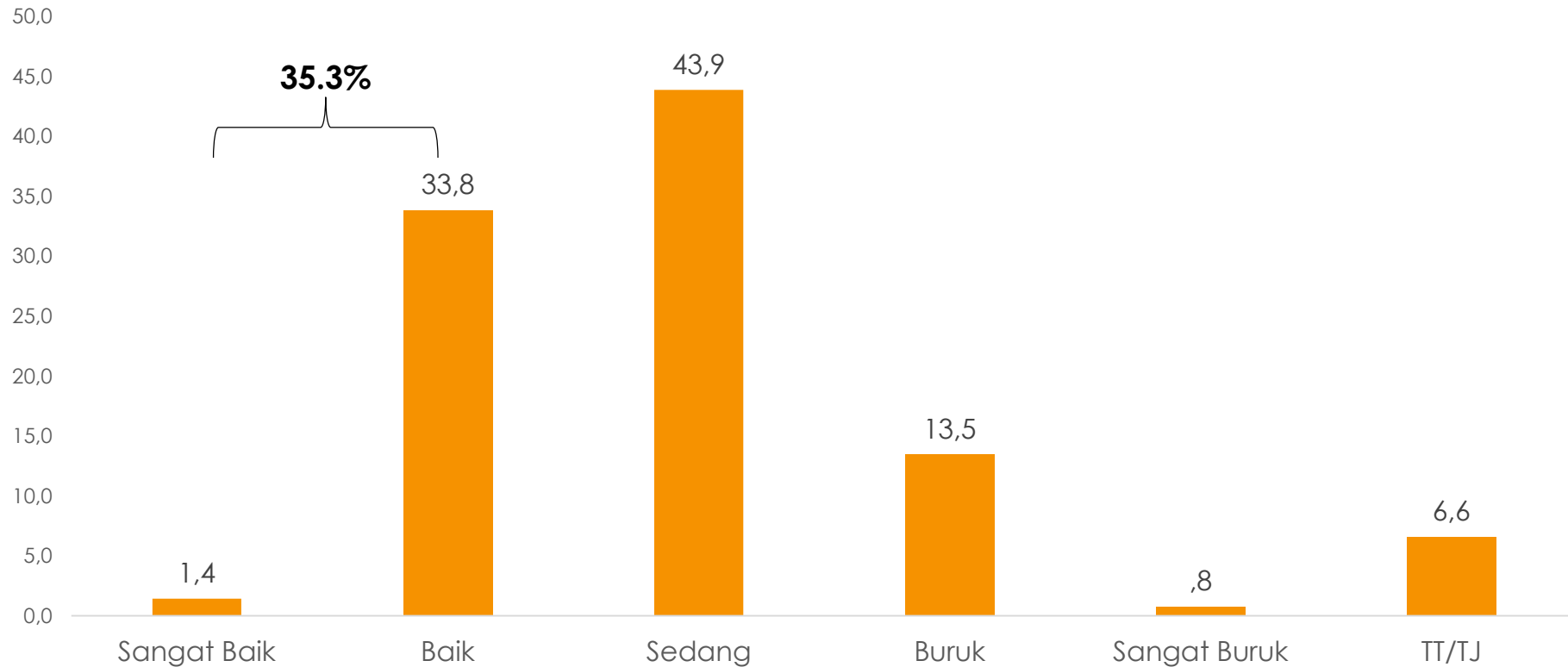


Persepsi publik tidak banyak berubah.



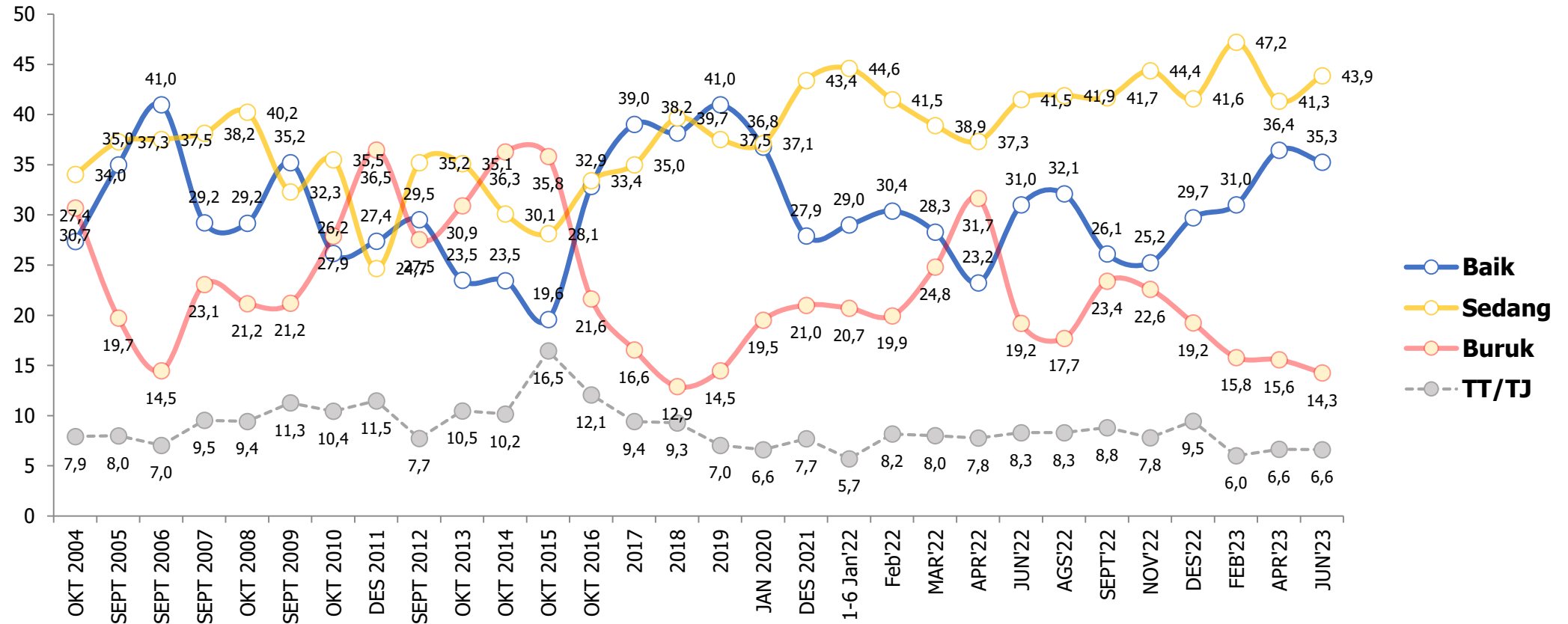
KONDISI POLITIK

Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan politik nasional pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? ... (%)



Lebih banyak yang menilai kondisi politik nasional saat ini sedang. Yang menilai baik atau sangat baik lebih banyak ketimbang yang menilai buruk atau sangat buruk.

TREN KONDISI POLITIK

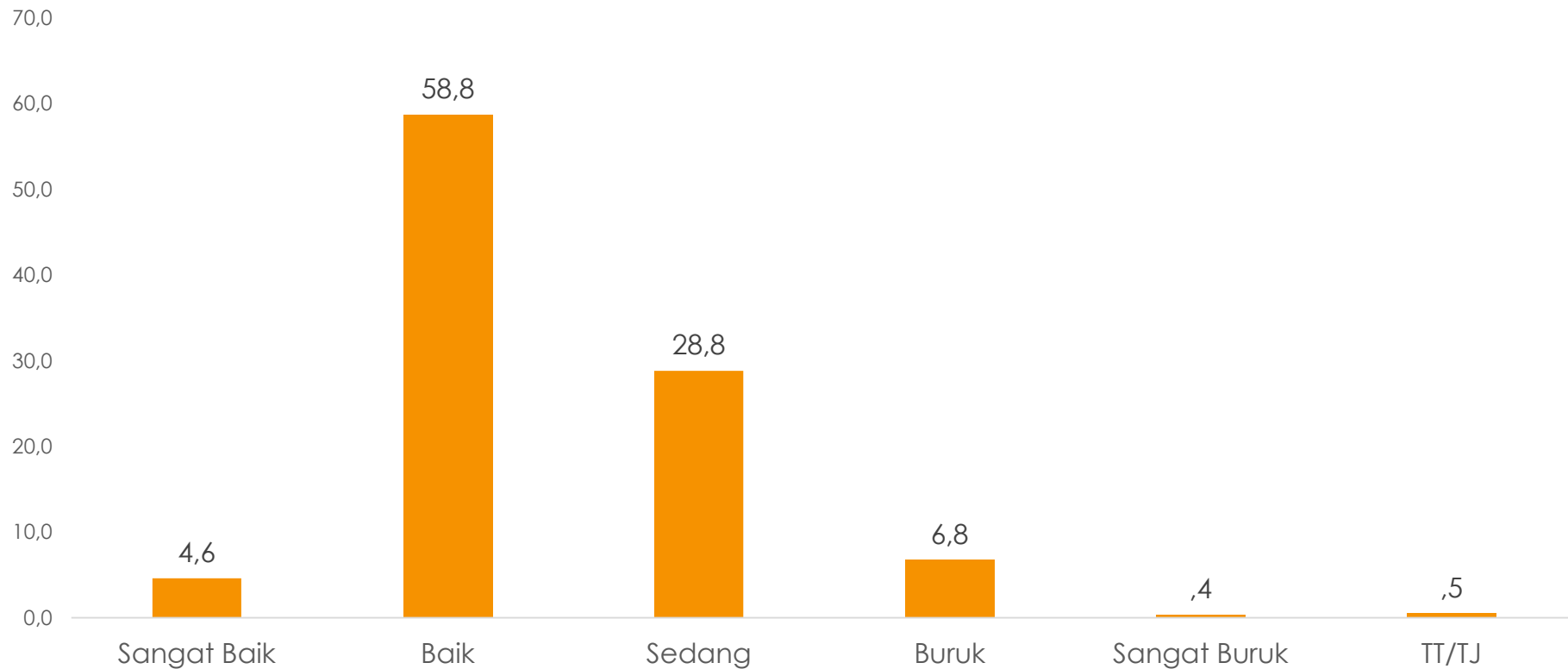


Sentimen positif terhadap kondisi politik agak turun sedikit



KONDISI KEAMANAN

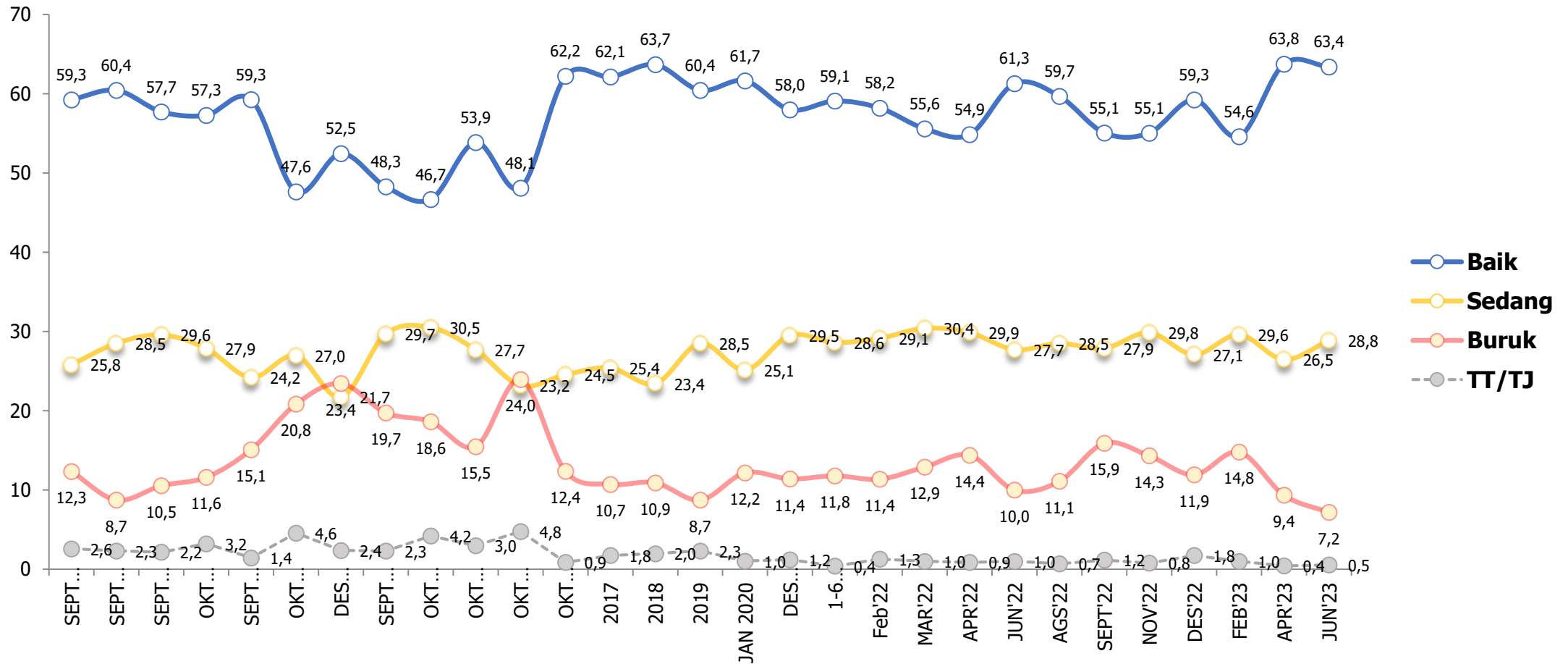
Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan keamanan di negara kita pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? ... (%)



Mayoritas menilai kondisi keamanan baik.

INDIKATOR

TREN KONDISI KEAMANAN

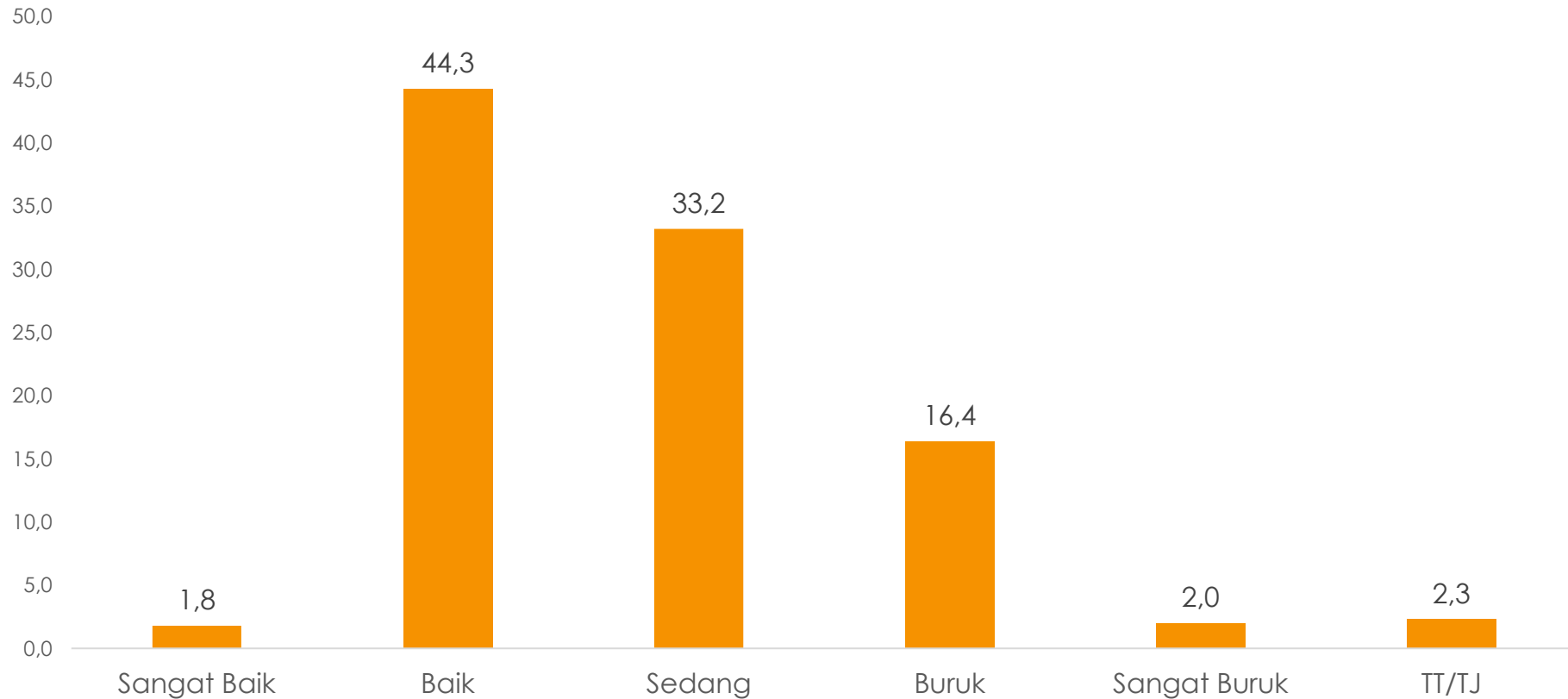


Persepsi publik tidak banyak berubah.



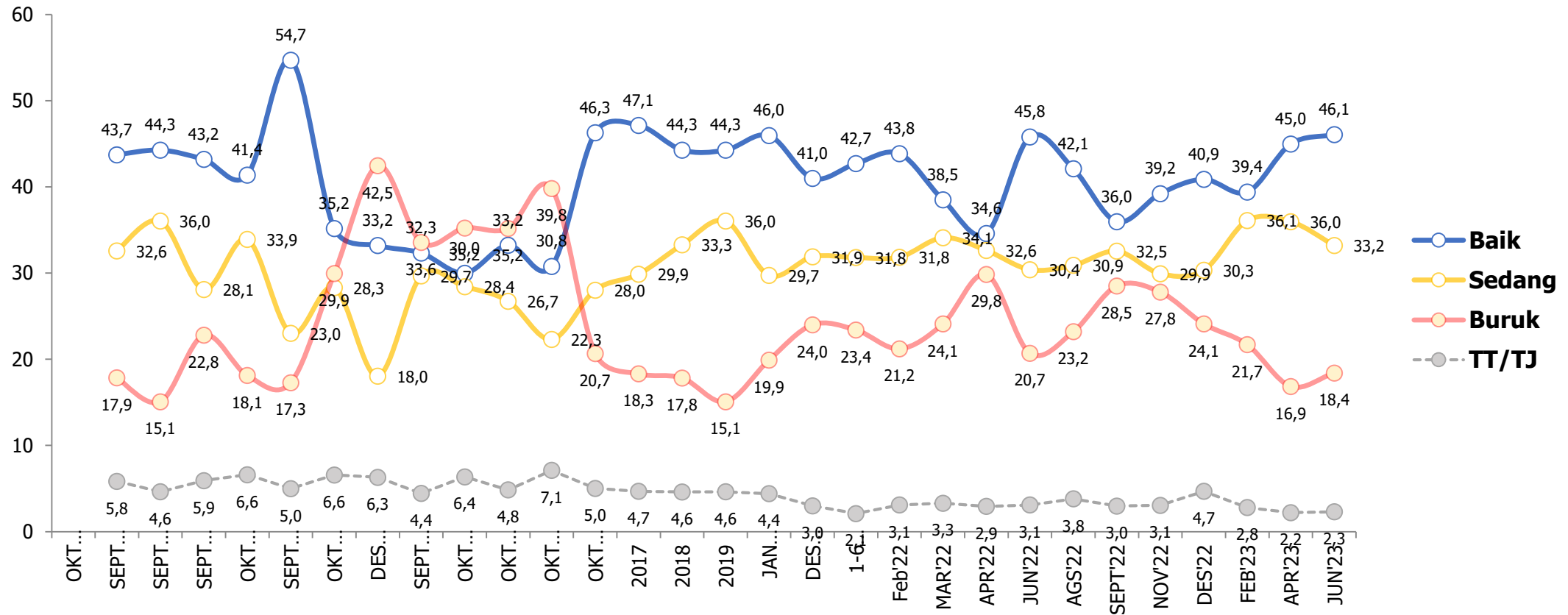
KONDISI PENEGAKAN HUKUM

Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang?
sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? ... (%)



Lebih banyak yang menilai kondisi penegakan hukum baik ketimbang buruk.

TREN KONDISI PENEGAKAN HUKUM

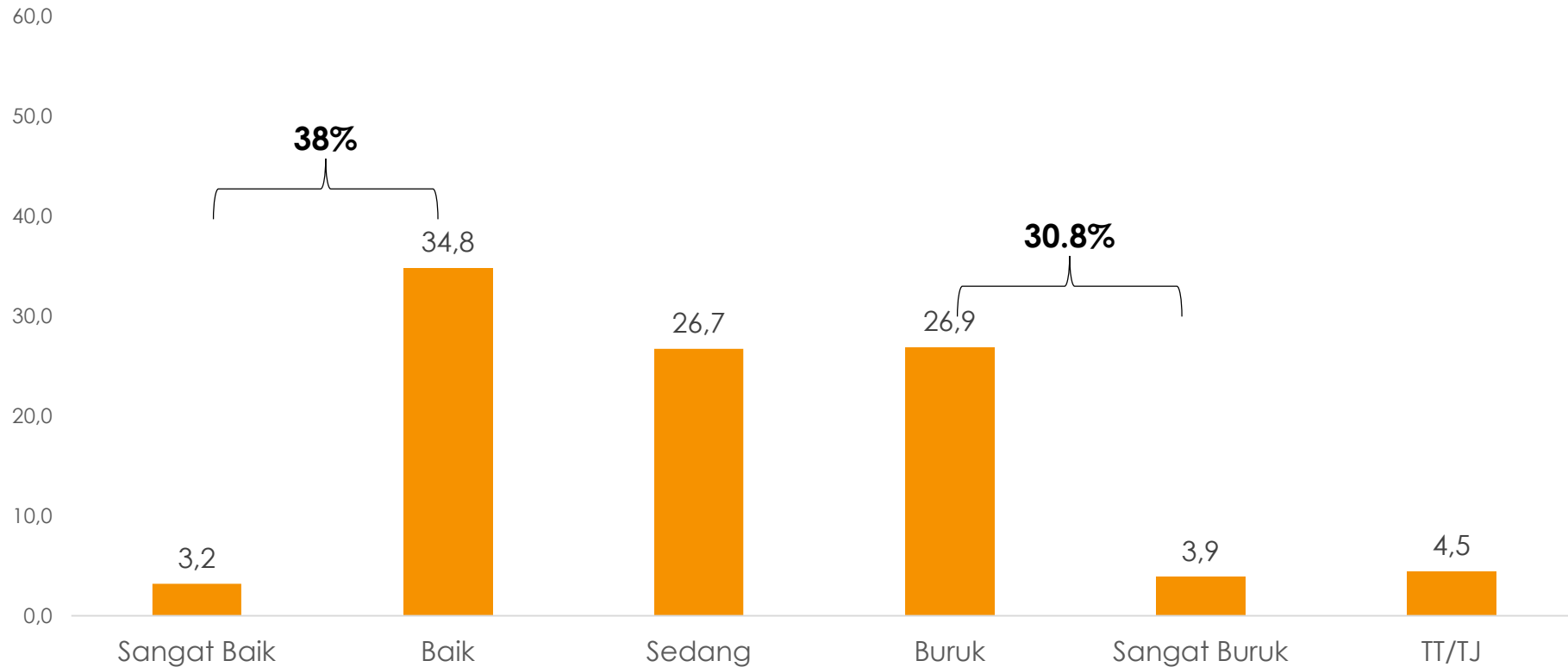


Persepsi publik tidak banyak berubah.



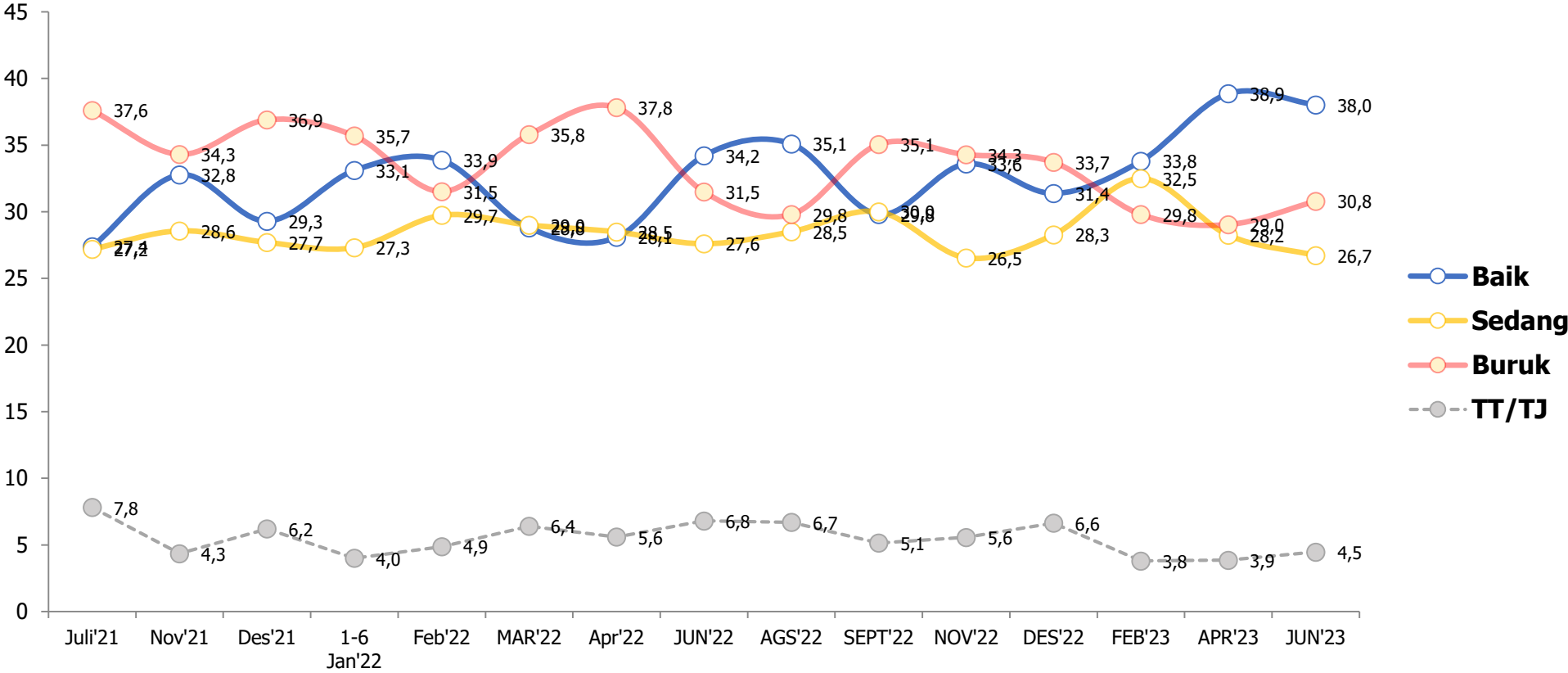
KONDISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk? ... (%)



Kondisi pemberantasan korupsi lebih banyak yang menilai positif, 38%.

TREN KONDISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Persepsi publik tidak banyak berubah.



PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT DEMOGRAFI

	Base	Baik	Sedang	Buruk	TT/TJ
GENDER					
Laki-laki	49.5	39.3	23.7	33.6	3.4
Perempuan	50.5	36.7	29.7	28.1	5.5
USIA					
<= 21 tahun	12.6	23.9	33.7	36.7	5.7
22 - 25 tahun	9.6	47.1	24.5	26.3	2.1
26 - 40 tahun	36.8	37.8	25.9	33.7	2.6
41 - 55 tahun	25.2	37.9	27.1	29.9	5.1
> 55 tahun	15.7	44.6	23.8	23.4	8.2
ETNIS					
Jawa	40.3	38.7	22.6	34.0	4.7
Sunda	16.0	43.5	25.8	25.7	5.0
Batak	3.6	33.8	31.0	35.2	0.0
Madura	3.2	46.6	32.6	20.8	0.0
Betawi	3.0	14.6	29.2	56.2	0.0
Minang	2.9	23.5	36.0	40.5	0.0
Bugis	2.5	53.1	9.0	32.4	5.6
Melayu	2.4	41.0	26.2	26.8	6.0
Lainnya	26.2	35.7	32.7	25.9	5.7
AGAMA					
Islam	87.0	38.7	25.1	31.8	4.4
NU	52.9	38.6	26.1	30.8	4.5
Muhammadiyah	4.3	30.8	24.1	43.9	1.1
Ornis Lainnya	1.1	41.5	0.0	58.5	0.0
Bukan bagian Ornis	38.3	38.6	24.1	32.3	5.0
TJ	3.5	49.9	30.8	16.3	3.0
Lainnya	13.0	33.5	37.5	24.3	4.7

	Base	Baik	Sedang	Buruk	TT/TJ
PENDIDIKAN					
<= SD	36.9	47.8	26.0	20.2	6.0
SLTP	18.5	36.2	27.4	32.0	4.4
SLTA	30.9	30.2	28.0	37.6	4.2
Kuliah	13.7	31.9	24.9	42.3	1.0
PEKERJAAN					
Petani/peternak/nelayan	12.6	45.2	25.8	25.2	3.8
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	31.9	43.0	23.9	27.8	5.3
Wiraswasta, pengusaha	7.2	32.9	23.6	42.7	.8
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.2	30.4	25.6	41.9	2.1
Ibu Rumah Tangga	28.9	38.7	27.6	27.4	6.2
Masih sekolah/kuliah	4.9	9.5	42.5	47.1	.9
Lainnya	4.3	34.8	34.1	27.1	4.0
PENDAPATAN					
< 1 juta	20.1	41.0	28.9	22.2	7.9
1 - < 2 juta	33.7	42.9	26.5	26.3	4.3
2 - < 4 juta	32.6	33.6	29.8	33.1	3.4
=> 4 juta	13.7	32.0	16.8	48.9	2.3

Kondisi pemberantasan korupsi lebih banyak yang menilai negatif ketimbang positif pada kelompok usia muda, etnis Batak, Betawi dan Minang, pendidikan dan pendapatan menengah atas, kalangan pegawai, wiraswasta dan ibu rumah tangga, dan terutama di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT WILAYAH

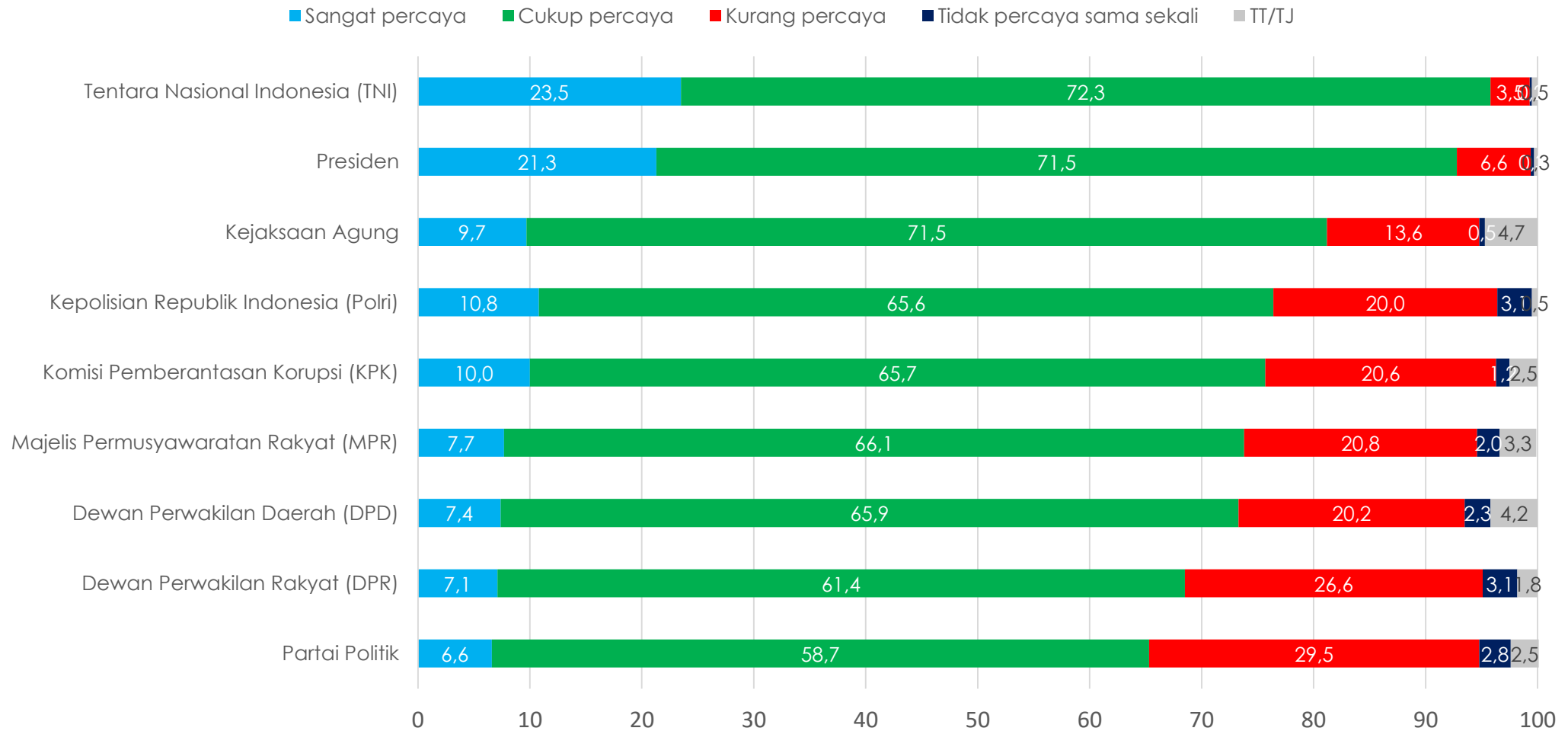
	Base	Baik	Sedang	Buruk	TT/TJ
DESA/KOTA					
Pedesaan	49.8	39.8	27.4	26.1	6.7
Perkotaan	50.2	36.2	26.0	35.5	2.3
WILAYAH					
SUMATERA	20.4	35.3	32.9	30.8	1.1
BANTEN	4.3	35.6	21.5	42.1	.8
DKI	4.1	15.4	32.3	51.2	1.1
JABAR	17.4	41.2	26.1	26.7	6.0
JATENG DIY	16.1	36.6	23.9	32.4	7.1
JATIM	16.2	42.1	20.6	35.0	2.4
BALI NUSA	5.3	49.3	28.8	21.3	.7
KALIMANTAN	5.9	36.8	37.0	23.5	2.7
SULAWESI	7.0	36.4	24.2	24.2	15.1
MALUKU PAPUA	3.3	43.4	19.9	26.8	10.0

Kondisi pemberantasan korupsi lebih banyak yang menilai negatif ketimbang positif pada kelompok usia muda, etnis Batak, Betawi dan Minang, pendidikan dan pendapatan menengah atas, kalangan pegawai, wiraswasta dan ibu rumah tangga, dan terutama di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

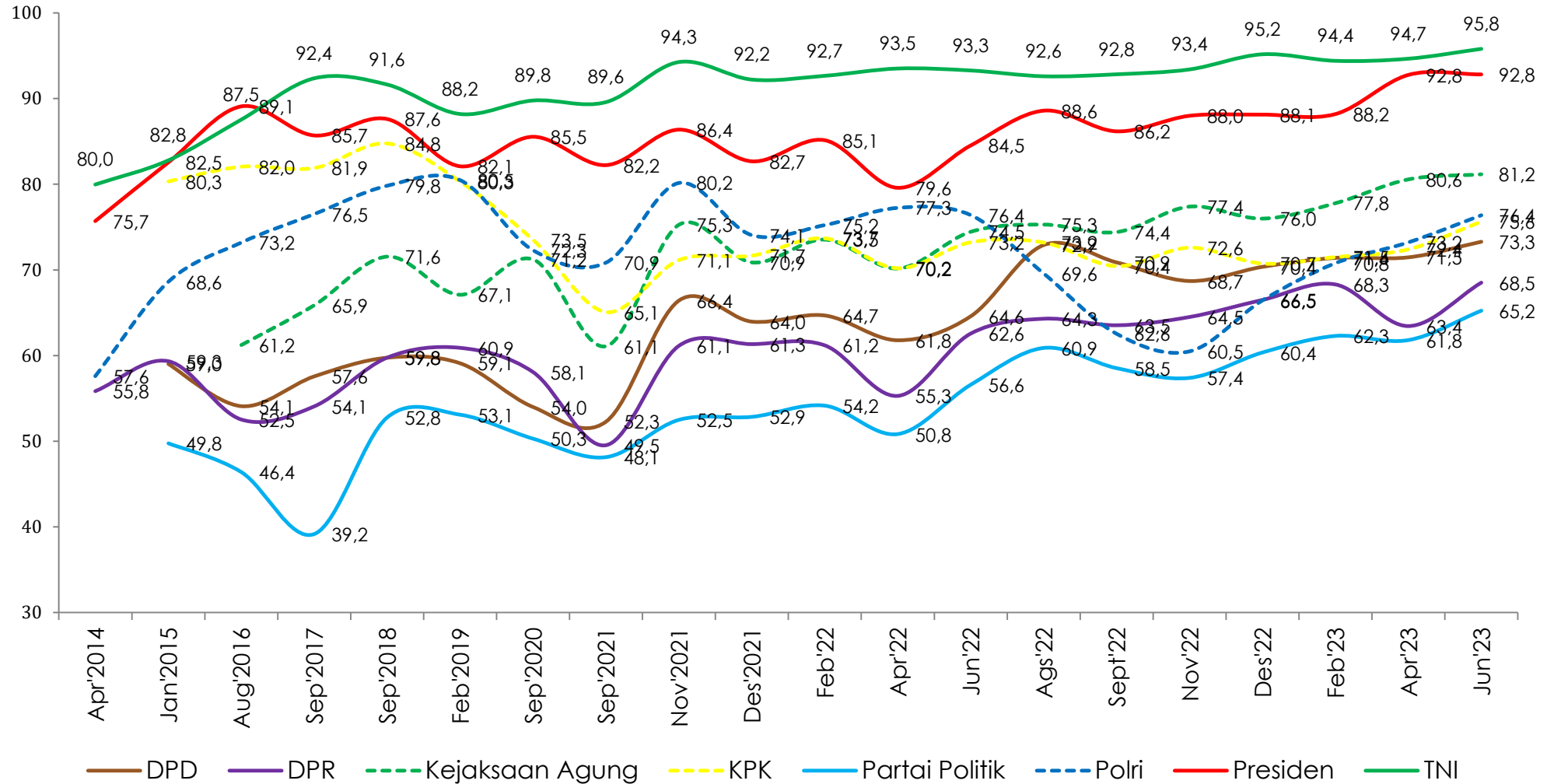
KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA

Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?... (%)



TREN KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA



TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA MENURUT DEMOGRAFI

	Base	PRESIDEN			TNI			POLRI			KPK			KEJAKSAAN AGUNG		
		Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
GENDER																
Laki-laki	49.5	92.5	7.0	.5	96.1	3.7	.2	74.5	25.2	.4	74.7	23.0	2.3	79.6	17.0	3.4
Perempuan	50.5	93.1	6.8	.1	95.5	3.6	.8	78.3	21.1	.7	76.6	20.7	2.7	82.7	11.3	6.0
USIA																
<= 21 tahun	12.6	95.7	4.3	0.0	95.2	4.8	0.0	73.2	26.8	0.0	69.7	30.3	0.0	83.9	10.6	5.5
22 - 25 tahun	9.6	98.0	2.0	0.0	90.3	9.7	0.0	73.4	26.6	0.0	75.7	22.2	2.1	84.9	13.0	2.1
26 - 40 tahun	36.8	92.7	6.7	.5	96.7	3.2	.1	76.7	23.1	.2	75.8	22.4	1.8	80.9	15.0	4.1
41 - 55 tahun	25.2	89.3	10.6	.2	95.4	3.1	1.5	74.9	24.1	1.0	75.1	22.2	2.7	80.0	16.5	3.5
> 55 tahun	15.7	93.2	6.3	.5	98.2	1.2	.6	82.5	16.4	1.2	80.6	13.3	6.1	79.4	11.7	8.9
ETNIS																
Jawa	40.3	94.8	5.0	.2	96.2	3.2	.7	72.7	26.5	.8	73.7	21.8	4.5	81.0	13.6	5.4
Sunda	16.0	93.6	6.4	0.0	96.9	2.5	.6	79.3	19.8	.9	78.4	19.4	2.2	85.2	12.5	2.3
Batak	3.6	93.3	6.7	0.0	96.7	3.3	0.0	64.9	35.1	0.0	58.1	38.7	3.2	73.4	23.8	2.8
Madura	3.2	92.4	7.6	0.0	98.6	1.4	0.0	83.4	16.6	0.0	81.3	18.7	0.0	81.2	13.3	5.5
Betawi	3.0	76.1	23.9	0.0	91.4	8.6	0.0	69.8	30.2	0.0	67.9	32.1	0.0	76.0	24.0	0.0
Minang	2.9	89.8	10.2	0.0	96.7	3.3	0.0	60.5	39.5	0.0	77.0	23.0	0.0	84.7	15.3	0.0
Bugis	2.5	75.0	25.0	0.0	85.1	12.5	2.4	68.1	31.9	0.0	71.3	28.7	0.0	58.2	31.1	10.8
Melayu	2.4	88.3	10.0	1.6	93.4	5.0	1.6	70.6	27.7	1.6	71.9	26.5	1.6	83.4	15.0	1.6
Lainnya	26.2	93.7	5.6	.7	95.8	4.1	.2	84.9	15.1	0.0	80.1	19.1	.7	82.2	11.8	6.0
AGAMA																
Islam	87.0	92.3	7.6	.2	96.0	3.4	.6	74.8	24.7	.6	73.9	23.3	2.9	80.7	14.5	4.8
NU	52.9	93.9	5.9	.2	96.7	3.1	.3	77.1	22.5	.4	78.1	18.4	3.5	84.2	11.4	4.5
Muhammadiyah	4.3	90.3	9.7	0.0	91.7	8.3	0.0	76.0	24.0	0.0	61.6	38.4	0.0	67.0	29.0	4.0
Ormis Lainnya	1.1	92.8	7.2	0.0	89.7	10.3	0.0	54.7	45.3	0.0	59.8	40.2	0.0	92.8	7.2	0.0
Bukan bagian Ormis	38.3	90.2	9.7	.1	95.8	3.2	1.1	71.5	27.7	.8	69.1	28.4	2.5	77.1	17.7	5.2
TJ	3.5	92.3	6.4	1.3	95.2	3.5	1.3	79.9	18.8	1.3	81.2	17.5	1.3	81.7	10.5	7.8
Lainnya	13.0	96.6	2.2	1.1	94.6	5.4	0.0	87.4	12.6	0.0	87.4	12.4	.1	84.0	11.8	4.1

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA MENURUT DEMOGRAFI

	Base	PARTAI POLITIK			DPR			MPR			DPD		
		Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
GENDER													
Laki-laki	49.5	63.0	34.8	2.2	66.4	32.2	1.4	72.5	25.1	2.4	70.5	25.3	4.2
Perempuan	50.5	67.4	29.8	2.8	70.6	27.2	2.3	75.1	20.7	4.2	76.0	19.7	4.3
USIA													
<= 21 tahun	12.6	51.9	45.8	2.3	66.5	31.2	2.3	75.0	22.8	2.3	71.3	23.8	4.9
22 - 25 tahun	9.6	68.8	29.1	2.1	71.8	26.1	2.1	87.4	10.5	2.1	82.7	15.2	2.1
26 - 40 tahun	36.8	64.5	33.4	2.1	66.2	32.9	.8	70.7	26.9	2.5	70.3	25.5	4.3
41 - 55 tahun	25.2	66.5	30.3	3.2	67.7	30.5	1.8	71.1	24.3	4.6	72.4	23.2	4.3
> 55 tahun	15.7	73.5	23.7	2.7	74.7	21.7	3.5	76.2	18.8	4.9	77.5	17.6	4.9
ETNIS													
Jawa	40.3	65.5	31.3	3.2	69.0	28.6	2.3	74.2	22.0	3.8	73.0	23.0	3.9
Sunda	16.0	64.6	33.9	1.5	70.7	28.1	1.2	74.6	23.5	1.9	76.5	21.5	2.0
Batak	3.6	47.5	49.3	3.2	45.6	51.2	3.2	65.3	31.6	3.2	55.7	41.2	3.2
Madura	3.2	64.5	35.5	0.0	65.7	34.3	0.0	74.0	26.0	0.0	80.2	19.8	0.0
Betawi	3.0	50.3	49.7	0.0	57.3	42.7	0.0	54.1	45.9	0.0	57.4	35.9	6.7
Minang	2.9	49.7	50.3	0.0	56.8	43.2	0.0	67.4	32.6	0.0	70.6	29.4	0.0
Bugis	2.5	50.0	44.4	5.6	63.7	33.8	2.4	54.1	33.8	12.1	66.5	16.2	17.3
Melayu	2.4	71.0	27.4	1.6	74.1	24.2	1.6	78.2	20.2	1.6	80.2	18.2	1.6
Lainnya	26.2	72.1	25.3	2.6	72.3	25.9	1.7	78.2	17.8	4.0	75.3	18.7	5.9
AGAMA													
Islam	87.0	63.8	33.4	2.8	67.6	30.3	2.1	72.7	23.7	3.6	72.9	23.0	4.1
NU	52.9	70.7	27.4	2.0	71.7	26.7	1.5	77.9	19.1	3.0	77.2	18.9	3.8
Muhammadiyah	4.3	52.1	47.9	0.0	59.8	40.2	0.0	55.1	44.9	0.0	61.7	38.3	0.0
Ormis Lainnya	1.1	42.3	57.7	0.0	54.7	45.3	0.0	69.8	30.2	0.0	54.7	45.3	0.0
Bukan bagian Ormis	38.3	54.9	40.9	4.3	62.3	35.0	2.7	66.8	28.6	4.6	67.7	27.4	4.8
TJ	3.5	77.9	17.4	4.8	77.2	16.2	6.7	82.6	10.7	6.7	82.6	10.7	6.7
Lainnya	13.0	75.2	24.5	.3	74.5	25.3	.1	81.1	17.2	1.7	76.1	18.8	5.1

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA MENURUT DEMOGRAFI

	Base	PRESIDEN			TNI			POLRI			KPK			KEJAKSAAN AGUNG		
		Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
PENDIDIKAN																
<= SD	36.9	94.5	5.2	.3	97.1	1.9	1.0	84.6	14.3	1.1	82.9	12.2	4.9	85.5	7.7	6.8
SLTP	18.5	94.8	5.2	0.0	97.2	2.6	.2	78.8	21.2	0.0	74.4	24.0	1.6	86.7	10.9	2.5
SLTA	30.9	92.2	7.6	.1	94.6	5.1	.3	68.0	31.8	.3	70.5	28.2	1.3	77.8	17.8	4.3
Kuliah	13.7	87.1	11.8	1.1	93.1	6.9	0.0	70.0	30.0	0.0	69.2	30.8	0.0	69.6	27.5	2.8
PEKERJAAN																
Petani/peternak/nelayan	12.6	93.7	5.8	.6	98.0	1.6	.4	84.6	14.3	1.1	83.0	12.7	4.3	86.1	7.2	6.7
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	31.9	92.2	7.7	.1	95.0	4.6	.4	75.1	24.6	.3	74.1	22.9	3.0	80.0	14.1	5.8
Wiraswasta, pengusaha	7.2	91.2	6.7	2.0	97.0	3.0	0.0	62.8	37.2	0.0	68.3	31.7	0.0	78.8	20.8	.4
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.2	93.7	6.3	0.0	90.5	9.5	0.0	71.9	28.1	0.0	75.5	23.4	1.1	76.2	23.5	.2
Ibu Rumah Tangga	28.9	92.9	7.0	.1	97.3	1.7	1.0	79.7	19.5	.8	76.1	21.4	2.6	83.0	11.4	5.6
Masih sekolah/kuliah	4.9	94.9	5.1	0.0	99.6	.4	0.0	73.9	26.1	0.0	75.5	24.5	0.0	76.9	19.5	3.7
Lainnya	4.3	92.9	7.1	0.0	91.8	7.2	1.0	76.1	22.8	1.0	75.8	21.0	3.2	83.8	12.9	3.2
PENDAPATAN																
< 1 juta	20.1	93.8	5.8	.4	96.7	2.4	.9	82.5	16.3	1.2	83.8	12.1	4.0	83.4	7.8	8.8
1 - < 2 juta	33.7	94.2	5.6	.1	96.0	3.4	.6	81.2	18.5	.3	78.4	18.1	3.5	85.9	9.2	4.9
2 - < 4 juta	32.6	93.9	5.5	.6	94.2	5.4	.3	72.9	26.6	.5	71.3	27.6	1.1	78.7	18.0	3.4
=> 4 juta	13.7	85.3	14.7	0.0	97.8	2.2	0.0	64.0	36.0	0.0	67.1	31.8	1.1	72.3	26.4	1.3

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA MENURUT DEMOGRAFI

	Base	PARTAI POLITIK			DPR			MPR			DPD		
		Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
PENDIDIKAN													
<= SD	36.9	77.7	19.7	2.7	81.4	16.0	2.6	81.4	14.1	4.5	82.3	12.6	5.1
SLTP	18.5	62.1	35.1	2.9	70.4	28.6	1.0	79.6	18.0	2.4	79.1	16.9	4.0
SLTA	30.9	56.3	40.5	3.2	56.2	41.7	2.1	64.9	31.3	3.7	62.3	32.4	5.3
Kuliah	13.7	56.2	43.8	0.0	59.1	40.9	0.0	65.5	33.9	.6	65.8	34.2	0.0
PEKERJAAN													
Petani/peternak/nelayan	12.6	75.5	21.9	2.6	79.5	17.4	3.1	81.1	12.9	6.0	79.8	14.2	6.0
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	31.9	65.0	32.0	3.0	68.5	29.9	1.6	73.2	24.1	2.6	72.6	22.8	4.7
Wiraswasta, pengusaha	7.2	55.7	43.2	1.1	58.0	42.0	0.0	67.8	31.9	.4	60.5	37.2	2.3
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.2	59.1	39.8	1.1	59.7	39.2	1.1	68.6	30.3	1.1	67.9	29.9	2.2
Ibu Rumah Tangga	28.9	66.8	30.7	2.5	70.8	27.6	1.6	74.5	21.1	4.4	77.1	19.1	3.8
Masih sekolah/kuliah	4.9	51.0	45.3	3.7	57.9	38.5	3.7	71.7	24.7	3.7	66.7	25.6	7.7
Lainnya	4.3	73.7	23.0	3.2	72.2	24.6	3.2	76.7	20.1	3.2	75.6	21.2	3.2
PENDAPATAN													
< 1 juta	20.1	74.2	22.6	3.2	78.1	17.6	4.2	82.7	11.4	5.9	82.9	11.2	5.9
1 - < 2 juta	33.7	71.0	26.4	2.6	74.3	23.8	1.8	79.9	17.3	2.8	78.3	17.0	4.7
2 - < 4 juta	32.6	58.1	40.5	1.5	63.1	36.2	.7	67.8	29.6	2.7	69.2	27.0	3.8
=> 4 juta	13.7	55.1	41.3	3.6	52.9	46.3	.8	60.1	37.5	2.4	56.4	41.7	1.8

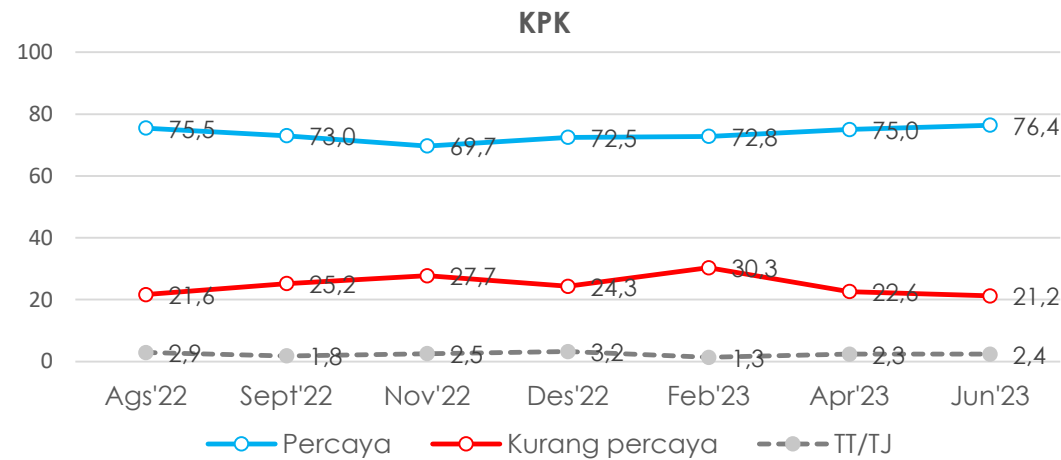
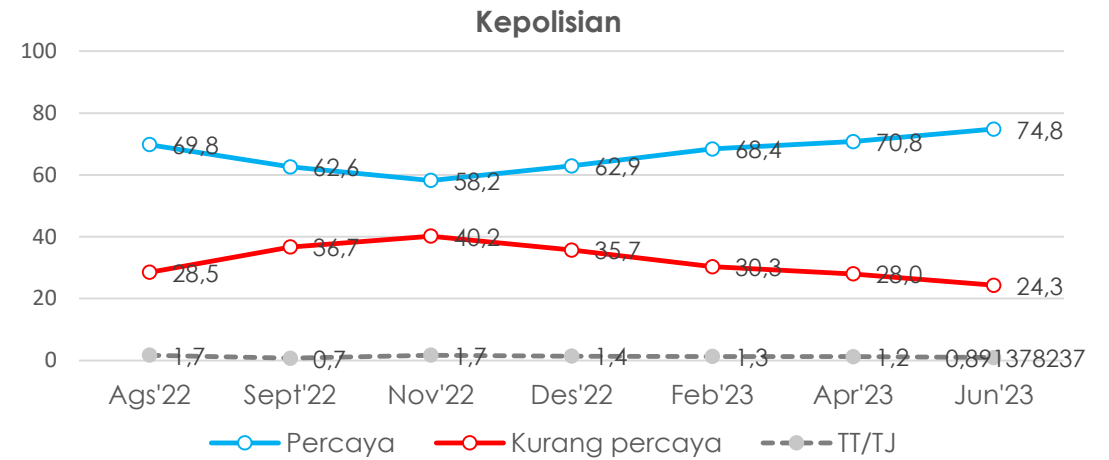
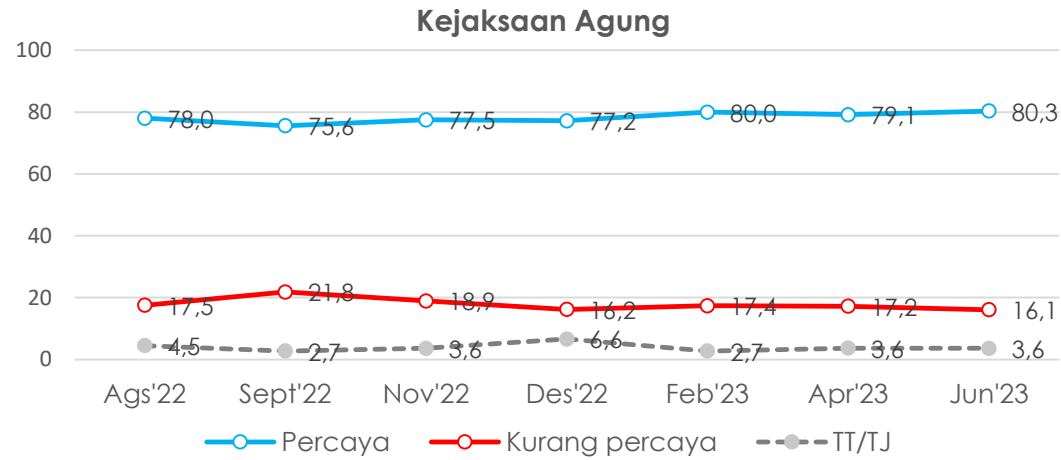
TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA MENURUT WILAYAH

	Base	PRESIDEN			TNI			POLRI			KPK			KEJAKSAAN AGUNG		
		Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
DESA/KOTA																
Pedesaan	49.8	95.4	4.0	.6	95.9	3.4	.7	82.7	16.5	.8	78.0	18.6	3.4	83.4	10.2	6.3
Perkotaan	50.2	90.3	9.7	0.0	95.7	3.9	.4	70.1	29.6	.2	73.3	25.1	1.6	78.9	18.0	3.1
WILAYAH																
SUMATERA	20.4	90.9	8.4	.7	97.2	2.8	0.0	73.6	26.4	0.0	71.8	27.5	.8	81.1	16.5	2.5
BANTEN	4.3	91.2	8.8	0.0	99.1	.9	0.0	88.1	11.9	0.0	71.0	29.0	0.0	86.9	13.1	0.0
DKI	4.1	67.7	32.3	0.0	88.5	11.5	0.0	46.9	53.1	0.0	65.8	34.2	0.0	65.3	34.7	0.0
JABAR	17.4	93.3	6.7	0.0	95.4	3.6	1.0	75.8	23.0	1.2	71.7	25.5	2.8	82.0	14.8	3.2
JATENG DIY	16.1	97.1	2.4	.4	96.9	2.4	.7	79.4	19.4	1.2	73.1	18.3	8.7	80.7	9.6	9.7
JATIM	16.2	95.0	5.0	0.0	93.4	6.2	.3	69.6	30.0	.3	80.8	17.8	1.3	83.0	13.6	3.4
BALI NUSA	5.3	100.0	0.0	0.0	98.6	1.4	0.0	95.6	4.4	0.0	96.5	3.5	0.0	96.5	3.5	0.0
KALIMANTAN	5.9	97.0	2.4	.7	97.8	1.5	.7	95.0	4.3	.7	89.5	9.8	.7	93.8	5.5	.7
SULAWESI	7.0	88.5	11.5	0.0	98.7	0.0	1.3	76.1	23.9	0.0	74.2	22.7	3.1	66.0	17.0	17.0
MALUKU PAPUA	3.3	94.2	4.6	1.2	85.8	12.9	1.2	72.9	27.1	0.0	70.2	29.8	0.0	67.5	23.4	9.1

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA MENURUT WILAYAH

	Base	PARTAI POLITIK			DPR			MPR			DPD		
		Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
DESA/KOTA													
Pedesaan	49.8	70.7	26.0	3.3	75.7	22.0	2.4	78.6	16.9	4.5	77.8	17.3	4.9
Perkotaan	50.2	59.8	38.4	1.7	61.4	37.3	1.3	69.1	28.7	2.2	68.8	27.6	3.6
WILAYAH													
SUMATERA	20.4	62.1	35.9	2.1	63.5	36.0	.6	71.1	27.8	1.1	71.0	27.9	1.1
BANTEN	4.3	60.3	39.7	0.0	60.2	39.8	0.0	73.7	26.3	0.0	74.5	25.5	0.0
DKI	4.1	38.2	61.8	0.0	36.9	63.1	0.0	37.2	62.8	0.0	46.9	48.2	4.9
JABAR	17.4	60.0	37.2	2.8	70.9	26.5	2.6	74.0	22.3	3.7	76.6	20.1	3.3
JATENG DIY	16.1	70.9	25.3	3.9	71.2	25.0	3.8	80.6	14.6	4.7	73.9	19.8	6.3
JATIM	16.2	67.7	31.2	1.1	70.4	29.3	.3	75.3	22.3	2.4	77.8	20.4	1.8
BALI NUSA	5.3	88.4	11.3	.3	91.9	8.1	0.0	91.9	8.1	0.0	93.0	7.0	0.0
KALIMANTAN	5.9	82.3	17.1	.7	83.3	16.1	.7	84.1	15.2	.7	84.1	13.3	2.6
SULAWESI	7.0	51.0	40.6	8.4	60.5	33.9	5.7	60.1	23.8	16.1	53.0	25.3	21.7
MALUKU PAPUA	3.3	75.5	20.1	4.4	67.3	28.2	4.4	75.5	20.1	4.4	67.6	24.1	8.3

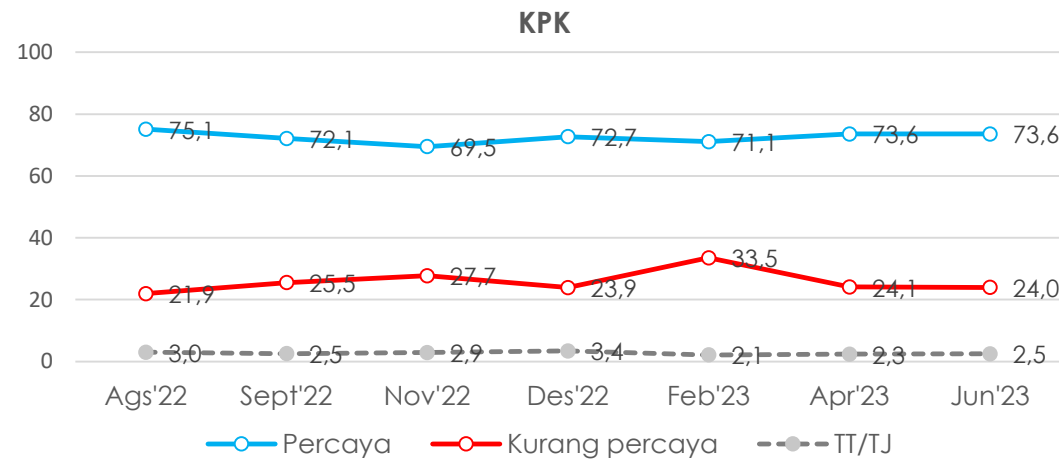
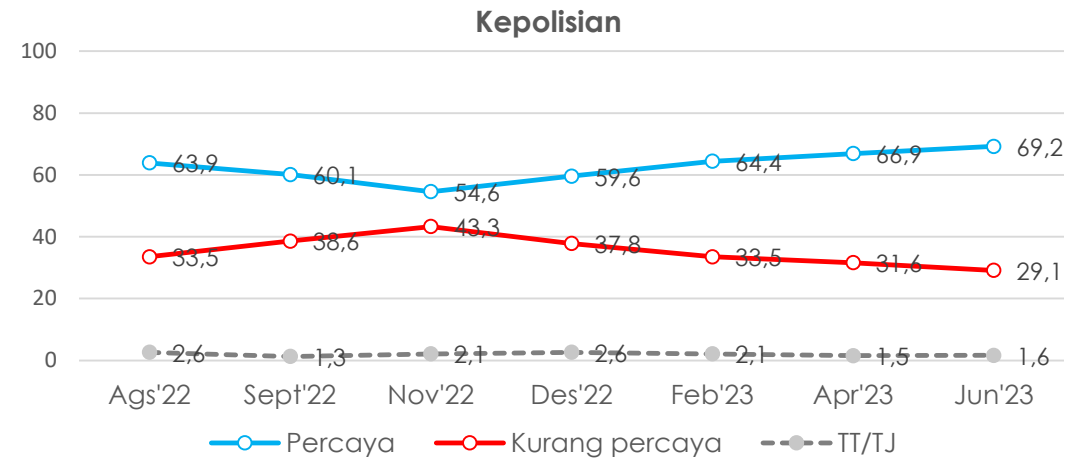
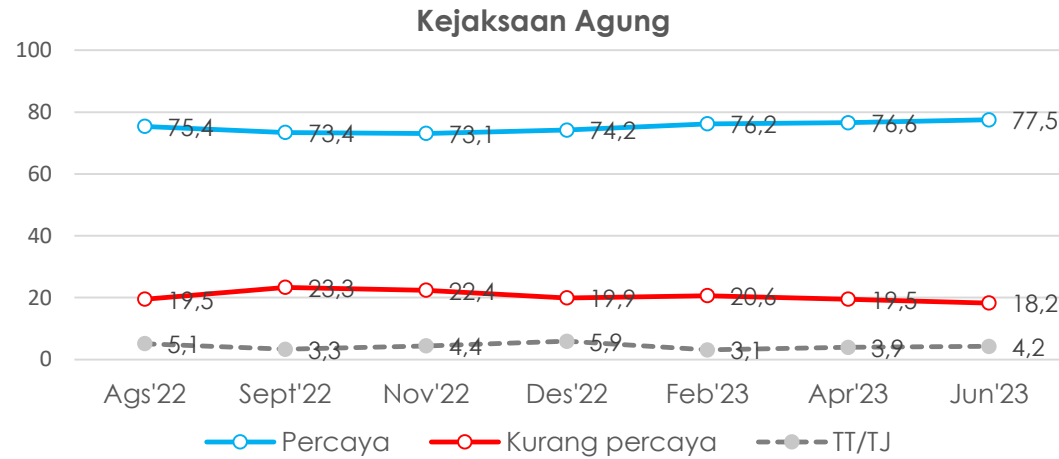
TREN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA DALAM PENEKAKAN HUKUM



Tingkat kepercayaan cenderung meningkat, terutama Kepolisian.



TREN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

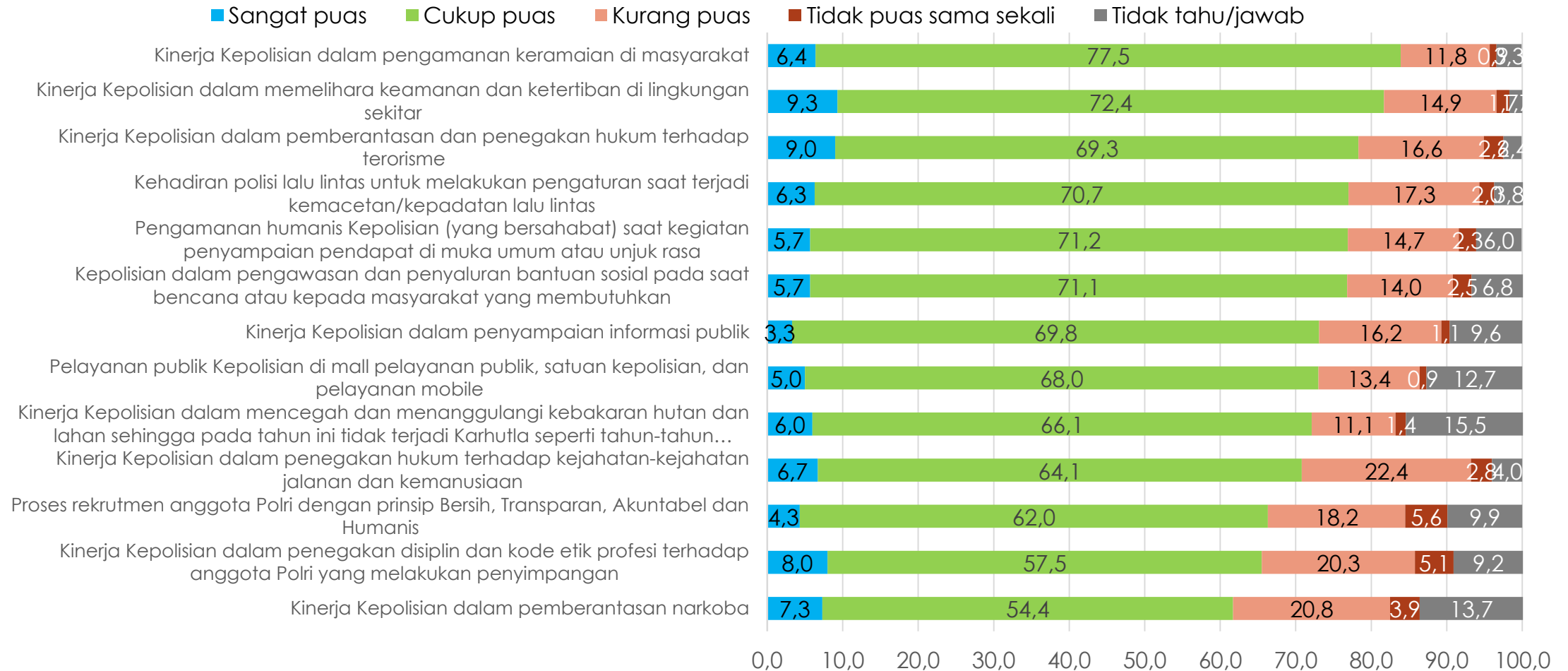


Tingkat kepercayaan cenderung meningkat, terutama Kepolisian.

KEPOLISIAN

EVALUASI TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN

Apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Kepolisian... ?... (%)

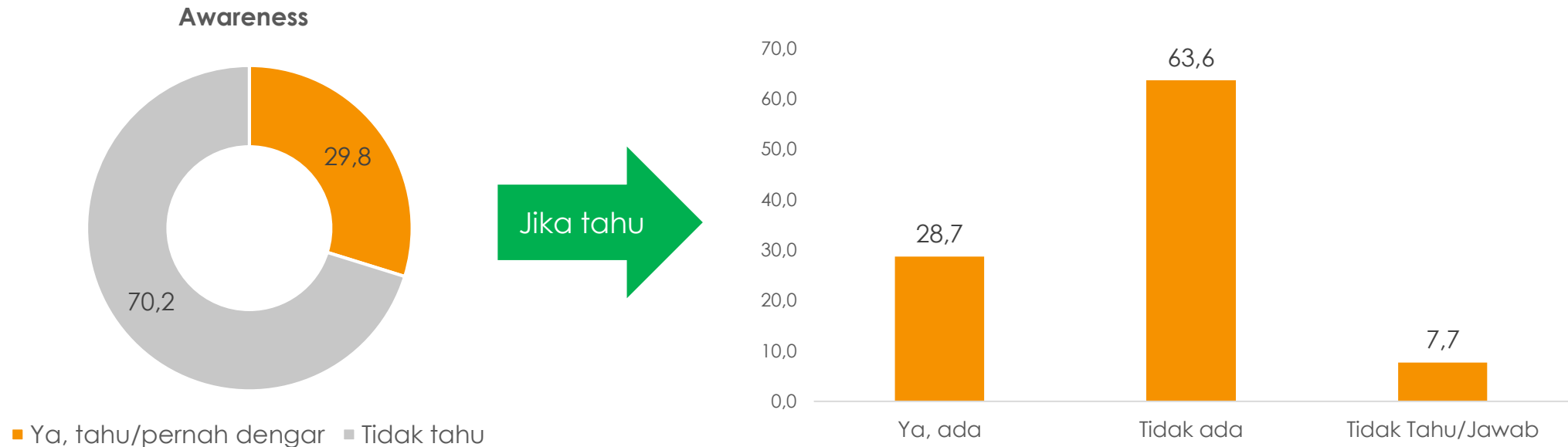


INDIKATOR

PERSONEL POLRI YANG BEKERJA MELEBIHI PANGGILAN TUGASNYA

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita tentang personel Polri yang bekerja melebihi panggilan tugasnya (seperti: membangun rumah ibadah/panti asuhan, menjadi guru bagi anak tidak mampu, menjadi guru ngaji, dll.)? ... (%)

Jika tahu atau pernah dengar, Apakah di daerah sekitar tempat tinggal Ibu/Bapak sini ada personel Polri yang bekerja melebihi panggilan tugasnya (seperti: membangun panti asuhan, menjadi guru bagi anak tidak mampu, menjadi guru ngaji, dll) tersebut?... (%)

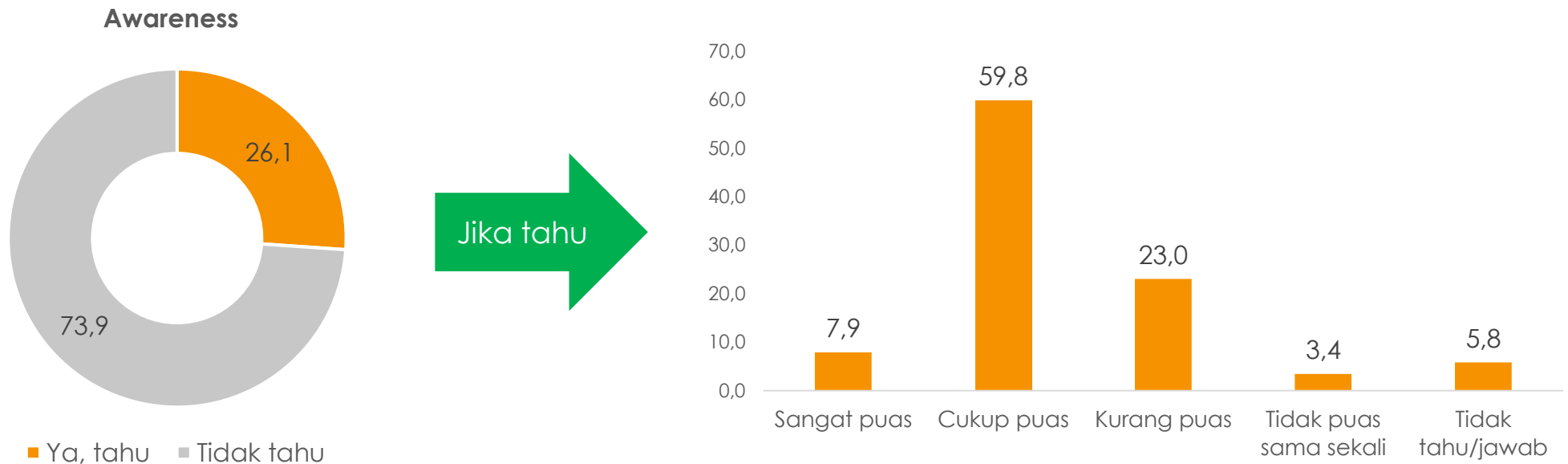


Sekitar 29.8% warga tahu berita tentang personel Polri yang bekerja melebihi panggilan tugasnya, dari yang tahu sekitar 28.7% mengaku ada polisi tersebut di daerah sekitar tempat tinggalnya.

KASUS PERDAGANGAN ORANG TERHADAP 26 WNI DI MYANMAR

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar kasus perdagangan orang terhadap 26 WNI di Myanmar? ... (%)

Jika tahu, Apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Kepolisian dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? (contoh: kasus pengekapan 26 WNI di Myanmar, scamming online di Filipina)... (%)

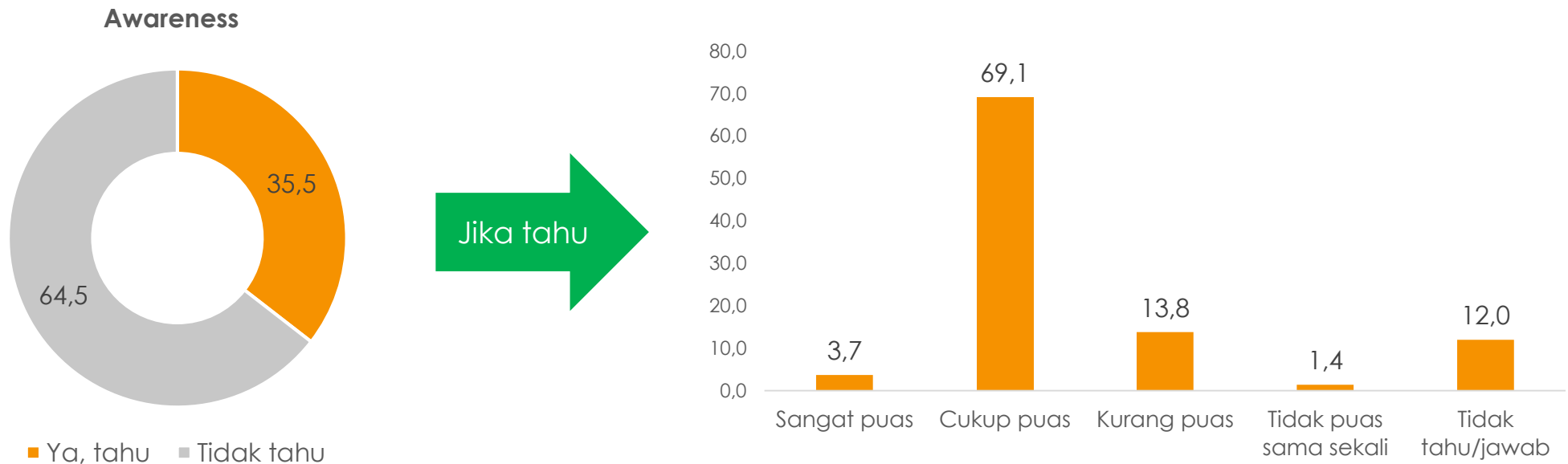


Sekitar 26.1% warga tahu atau pernah dengar kasus perdagangan orang terhadap 26 WNI di Myanmar, dari yang tahu mayoritas puas dengan kinerja Kepolisian dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 67.7%.

APLIKASI SINAR

Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah menggunakan, dengar/lihat/baca) tentang layanan perpanjangan SIM secara Online (Aplikasi SINAR)? ... (%)

Jika tahu, Apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Kepolisian dalam layanan perpanjangan SIM secara Online (Aplikasi SINAR)?... (%)

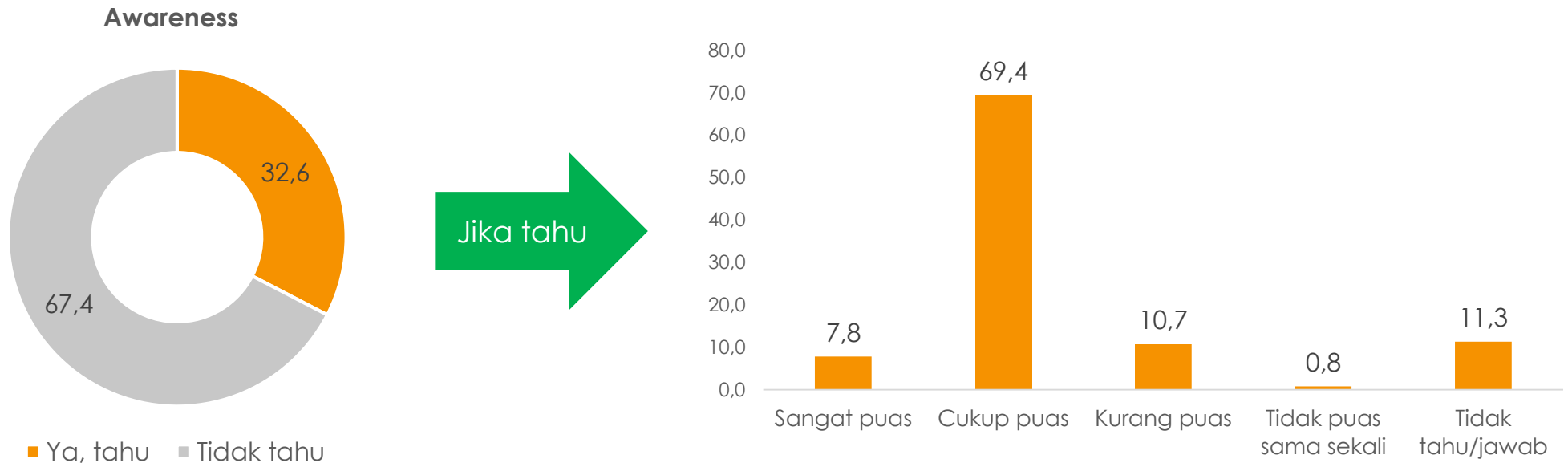


Sekitar 35.5% warga tahu tentang layanan perpanjangan SIM secara Online (Aplikasi SINAR), dari yang tahu mayoritas merasa puas dengan kinerja Kepolisian dalam layanan perpanjangan SIM secara Online (Aplikasi SINAR), 72.8%.

APLIKASI SIGNAL

Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah menggunakan, dengar/lihat/baca) tentang layanan pembayaran pajak kendaraan secara online (Aplikasi SAMSAT Digital Nasional/SIGNAL)?... (%)

Jika tahu, Apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Kepolisian dalam layanan pembayaran pajak kendaraan secara online (Aplikasi SAMSAT Digital Nasional/SIGNAL)?... (%)

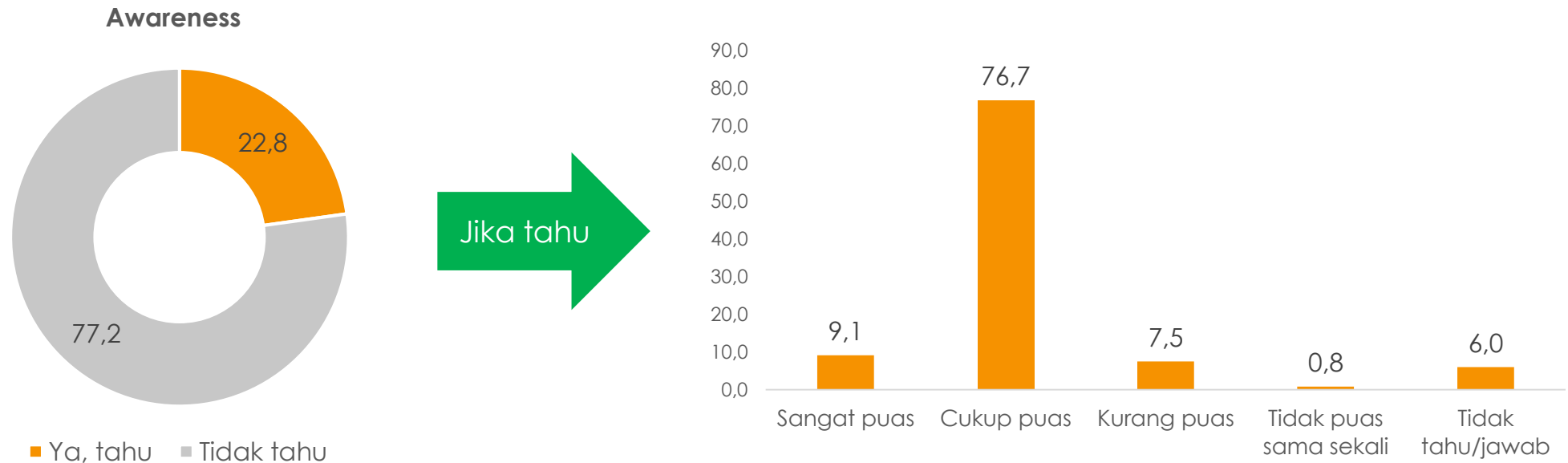


Sekitar 32.6% warga tahu tentang layanan pembayaran pajak kendaraan secara online (Aplikasi SAMSAT Digital Nasional/SIGNAL), dari yang tahu mayoritas merasa puas dengan kinerja Kepolisian dalam layanan pembayaran pajak kendaraan secara online (Aplikasi SAMSAT Digital Nasional/SIGNAL), 77.2%.

LAYANAN SKCK ONLINE

Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah menggunakan, dengar/lihat/baca) tentang layanan SKCK secara Online?... (%)

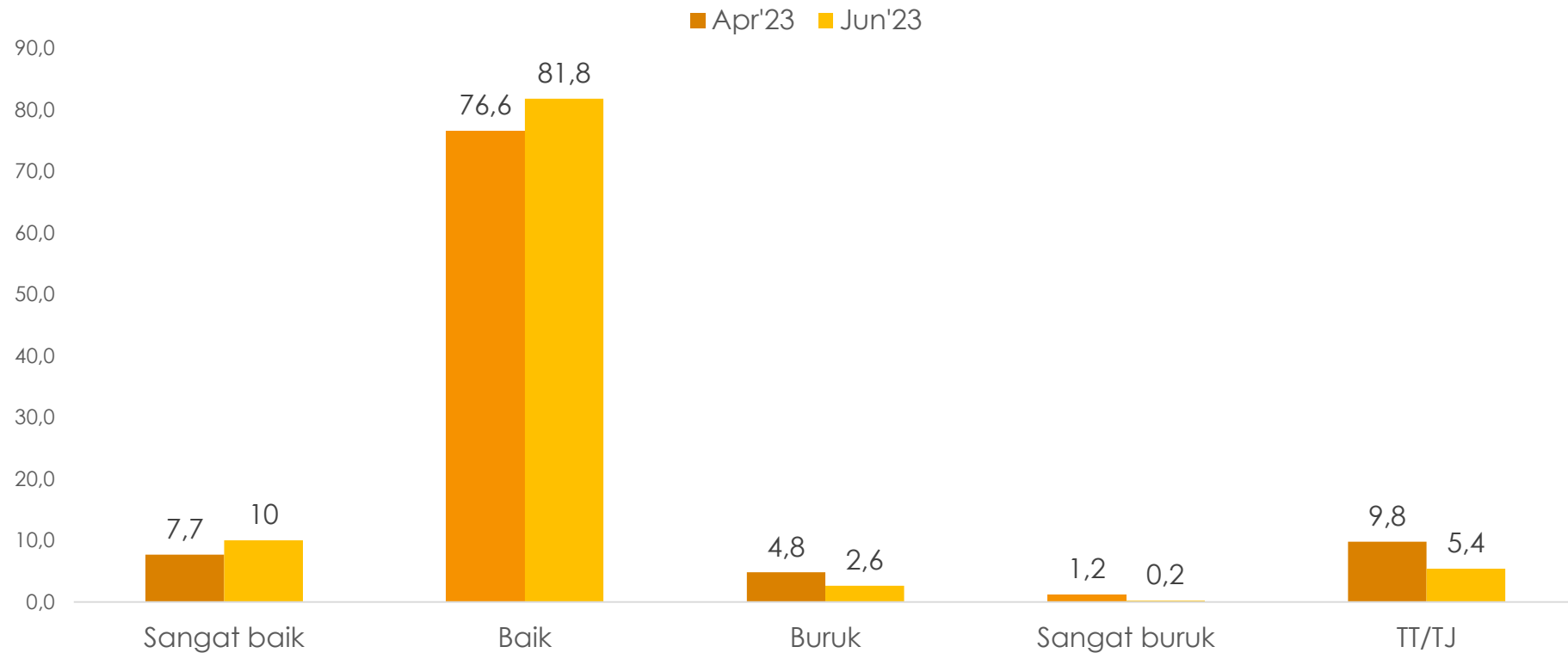
Jika tahu, Apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Kepolisian dalam layanan SKCK secara Online?... (%)



Sekitar 22.8% warga tahu tentang layanan SKCK secara Online, dari yang tahu mayoritas puas dengan kinerja Kepolisian dalam layanan SKCK secara Online, 75.8%.

HUBUNGAN TNI-POLRI

Menurut Ibu/Bapak bagaimana hubungan antara TNI-Polri di wilayah sekitar tempat tinggal sini?... (%)

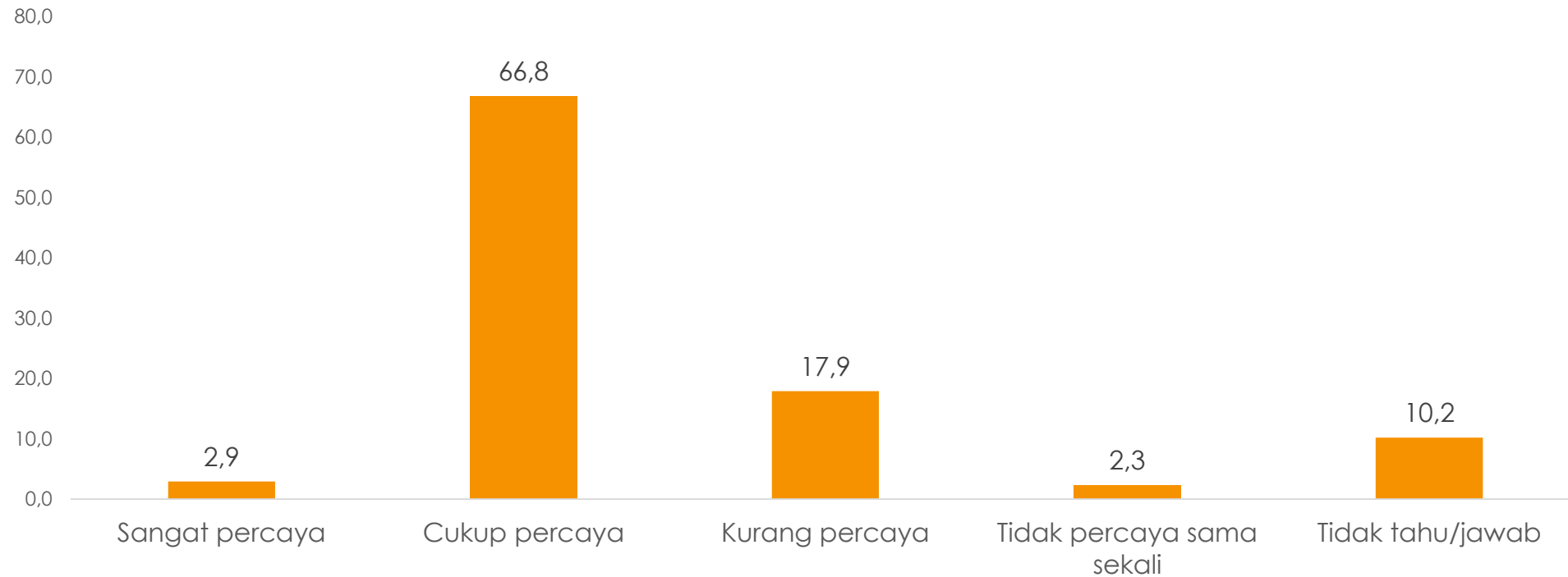


Mayoritas menilai baik hubungan antara TNI-Polri.



PERCAYA KEPOLISIAN MAMPU MELAKUKAN PEMBENAHAN INTERNAL?

Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali bahwa Kepolisian mampu melakukan pembersihan internal?... (%)

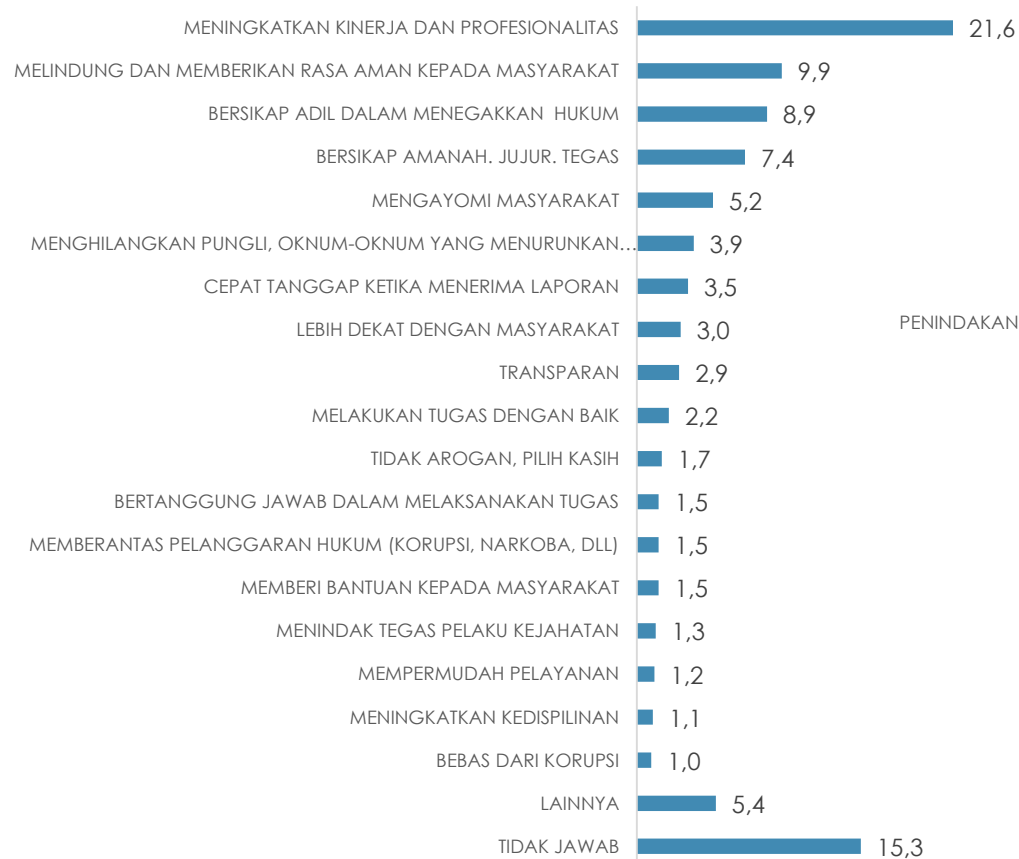


Mayoritas percaya bahwa Kepolisian mampu melakukan pembersihan internal.

HARAPAN DAN HAL YANG PALING PERLU DIBENAHI POLRI

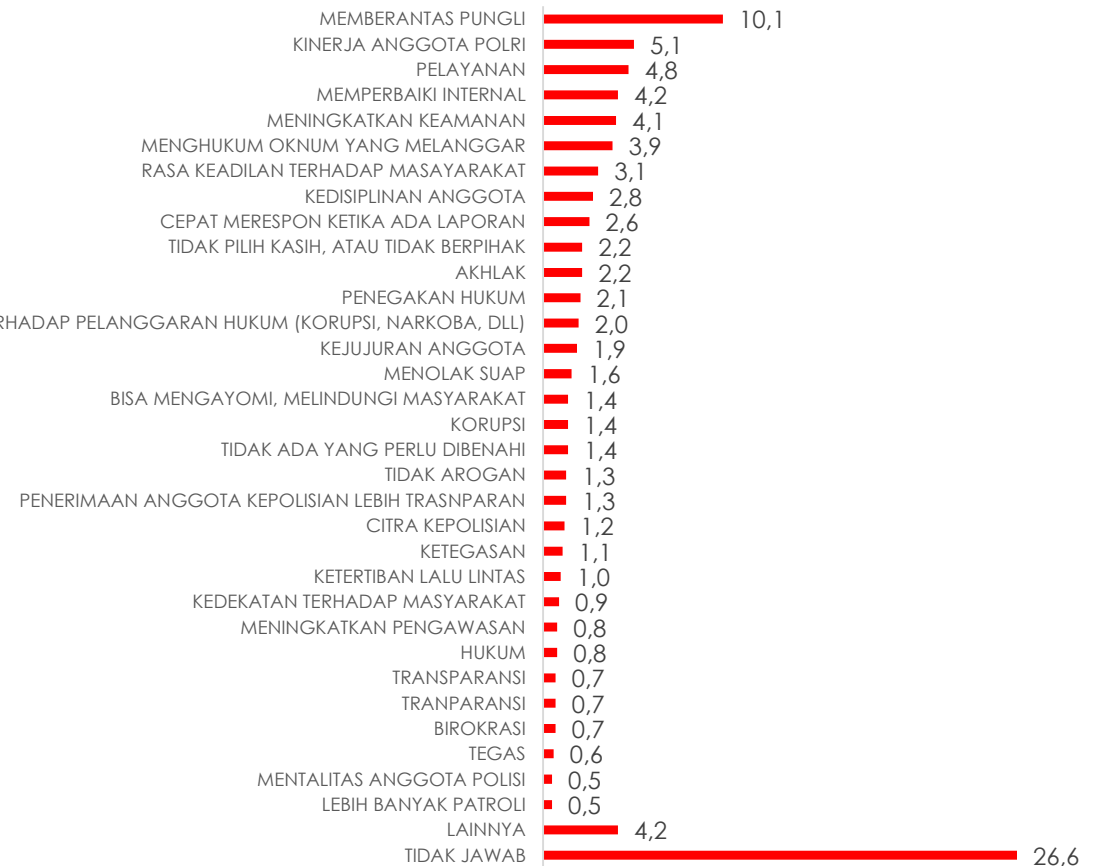
Apakah yang paling Ibu/Bapak harapkan terhadap Polri ke depan?... (%)

HARAPAN



Apakah yang menurut Ibu/Bapak paling perlu dibenahi dari Polri ke depan?... (%)

HAL YANG PALING PERLU DIBENAHI

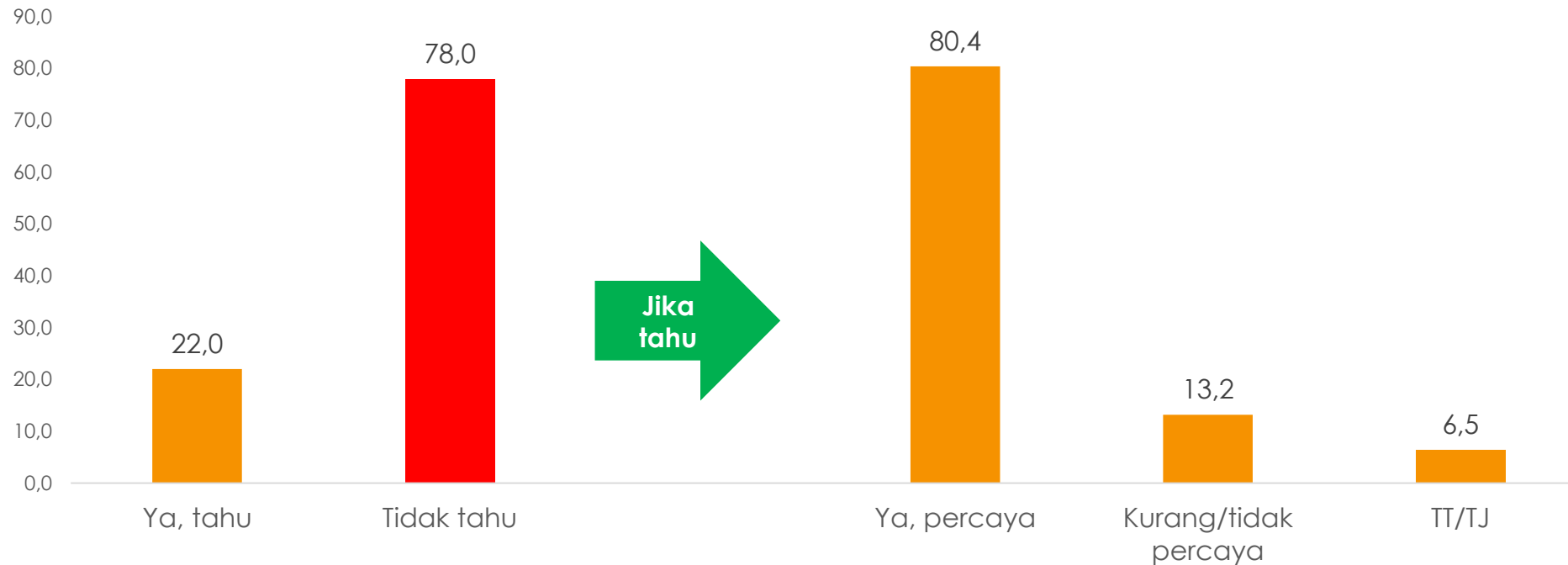


KEJAKSAAN AGUNG

DUGAAN KORUPSI BTS DENGAN TERSANGKA JOHNY G. PLATE

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar kasus dugaan korupsi BTS dengan tersangka Johnny G. Plate (mantan Menkominfo) yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung? ... (%)

Jika tahu atau pernah dengar, apakah Ibu/Bapak percaya mantan Menkominfo Johnny G. Plate melakukan korupsi?... (%)

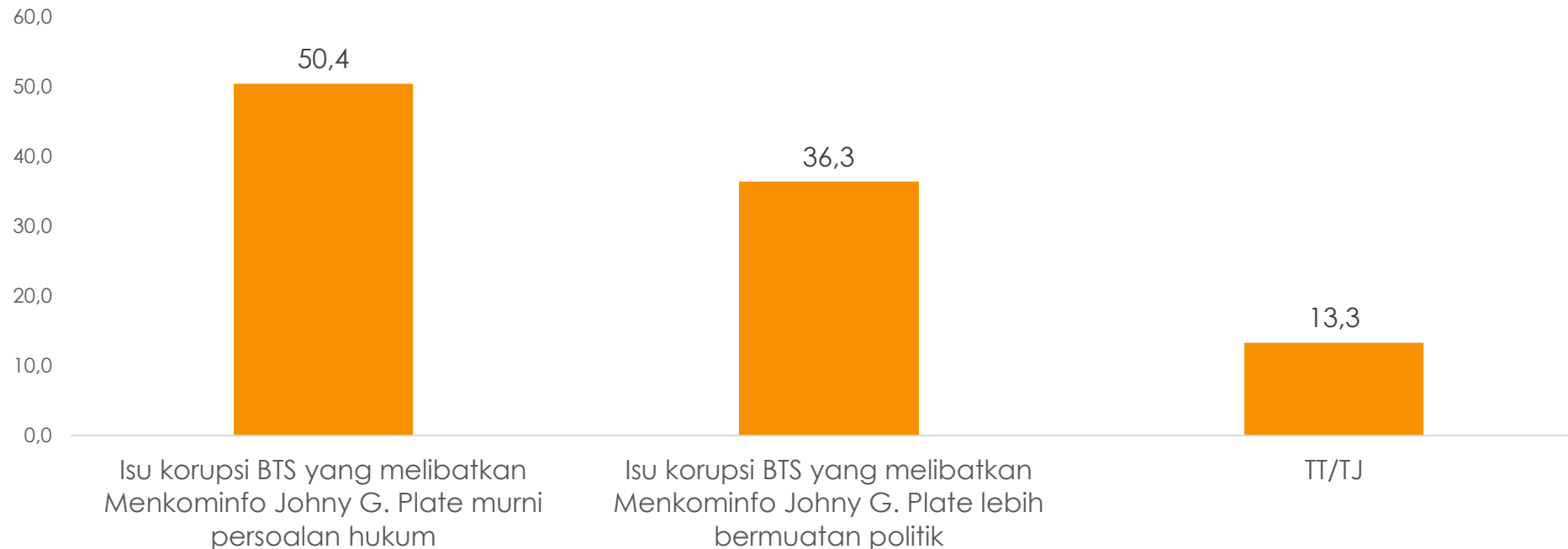


Sekitar 22% tahu atau pernah dengar kasus dugaan korupsi BTS dengan tersangka Johnny G. Plate (mantan Menkominfo) yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, dari yang tahu mayoritas percaya bahwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate melakukan korupsi, 80.4%.

KASUS JOHNY G. PLATE MURNI PERSOALAN HUKUM ATAU BERMUATAN POLITIK?

(BASE: TAHU KASUS DUGAAN KORUPSI BTS)

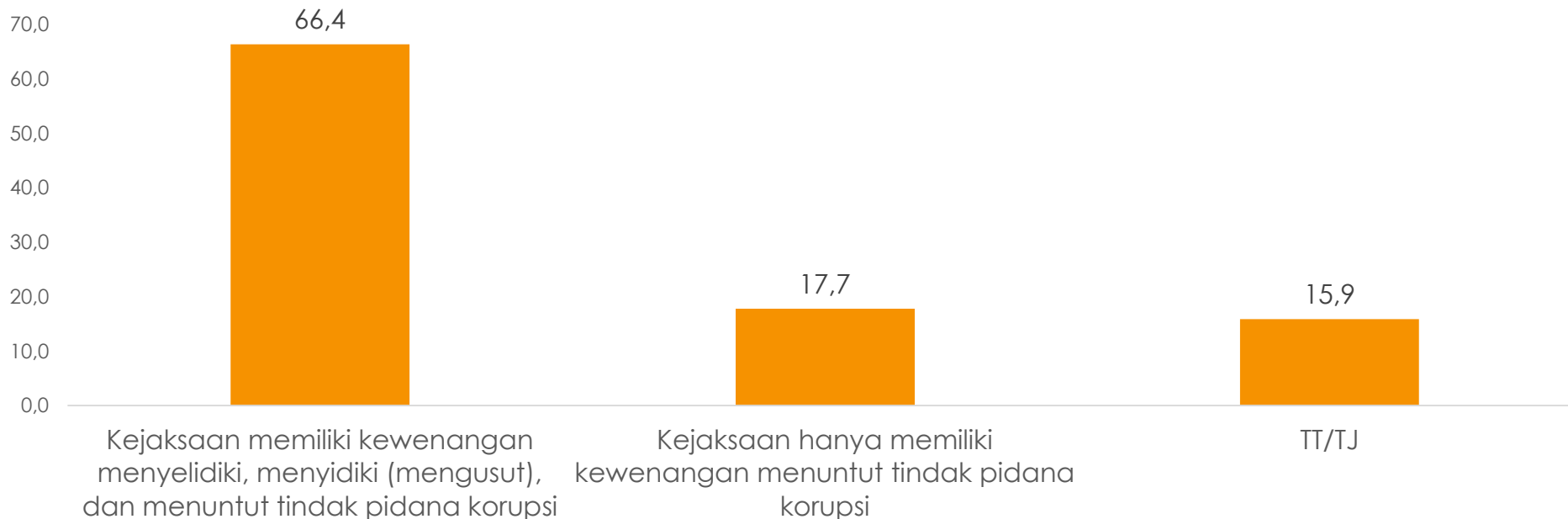
Ada yang berpendapat bahwa dugaan tindak pidana korupsi BTS yang melibatkan Johnny G. Plate (mantan Menkominfo) adalah murni persoalan hukum. Tapi ada yang berpendapat hal tersebut lebih bermuatan politik. Bagaimana menurut Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Dari yang tahu kasus dugaan korupsi BTS, sekitar 50.4% menilai bahwa isu tersebut murni persoalan hukum sementara 36.3%-nya menilai kasus tersebut lebih bermuatan politik.

KEWENANGAN KEJAKSAAN

Saat ini Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, pengusutan, dan penuntutan untuk kasus tindak pidana korupsi. Ada yang berkeinginan agar kewenangan Kejaksaan dibatasi hanya menuntut kasus korupsi saja. Menurut Ibu/Bapak apakah Kejaksaan sebaiknya memiliki kewenangan menyelidiki, menyidiki (mengusut), dan menuntut tindak pidana korupsi atau Kejaksaan cukup memiliki kewenangan menuntut saja?... (%)

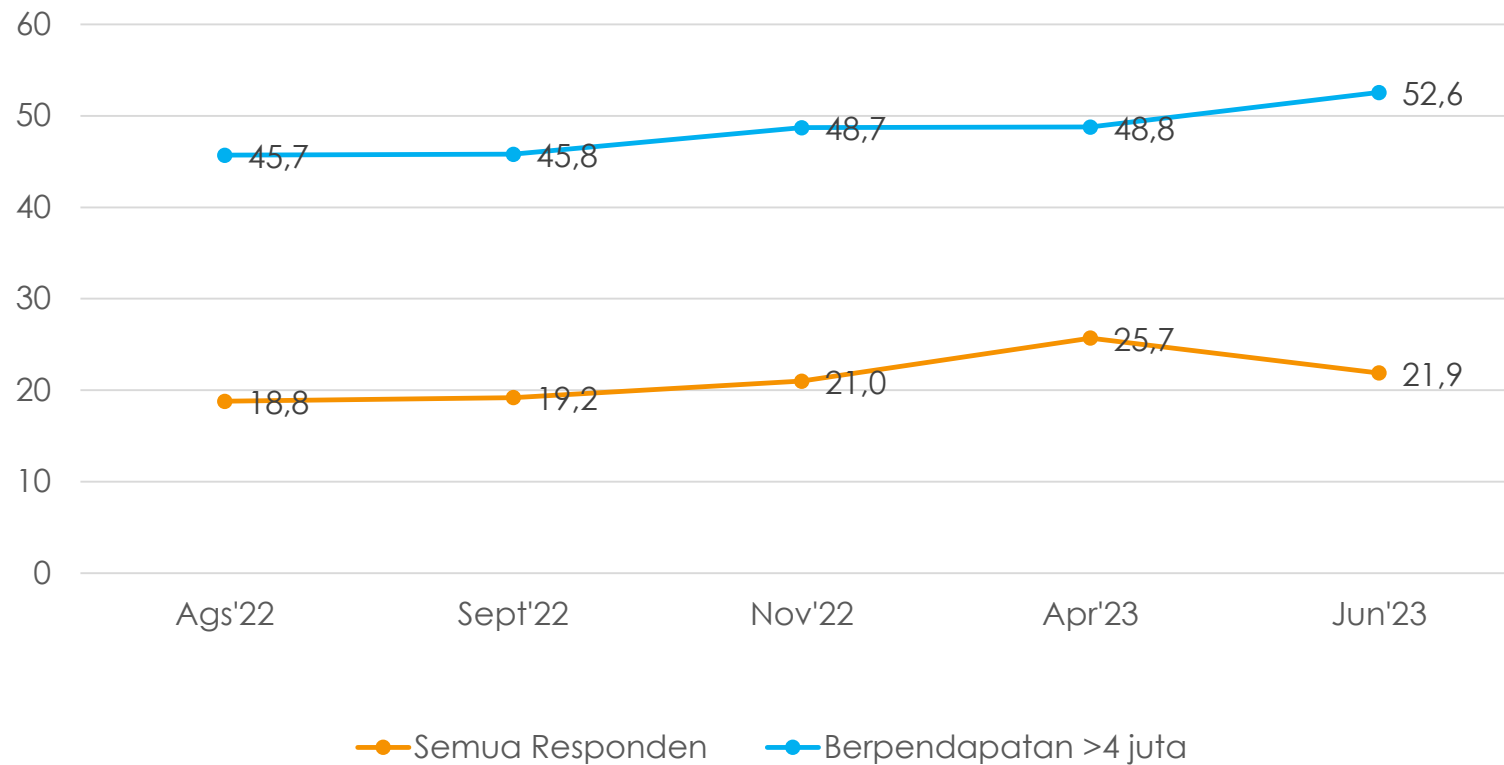


Mayoritas, 66.4%, menilai bahwa kejaksaan memiliki kewenangan menyelidiki, menyidiki, dan menuntut tindak pidana korupsi.

PERPAJAKAN

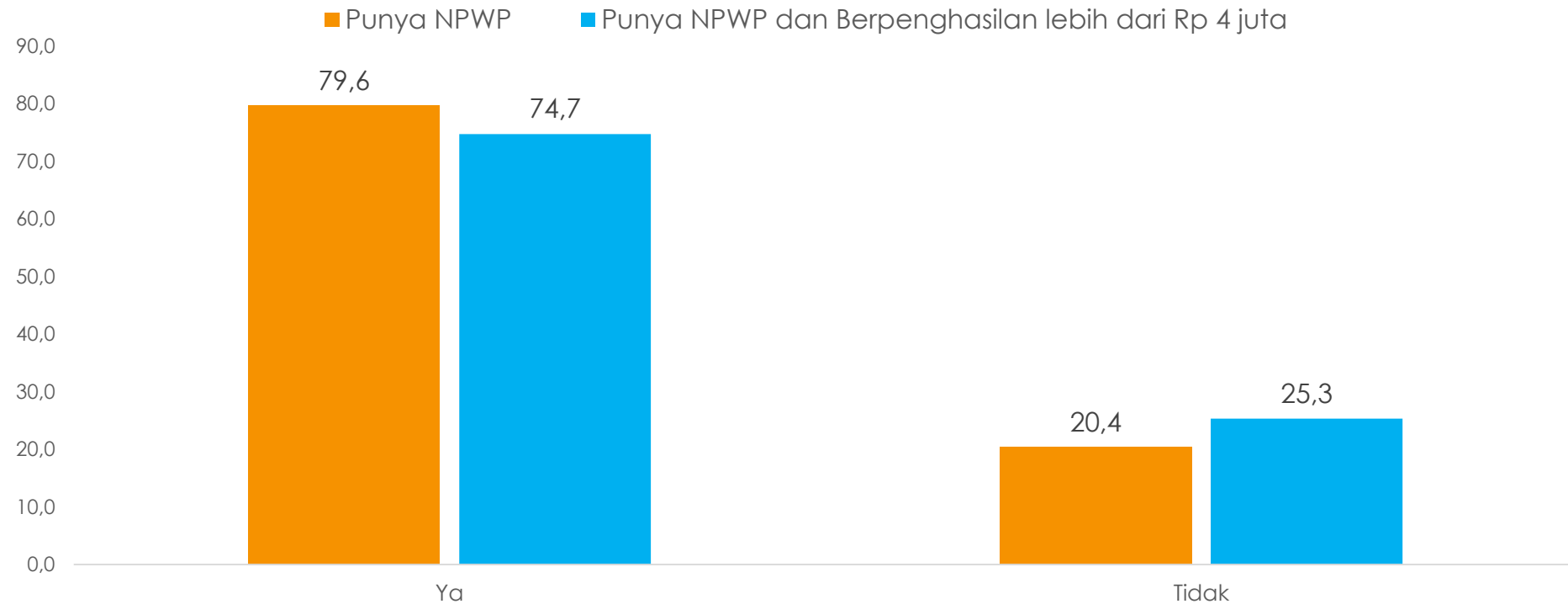
KEPEMILIKAN NPWP

Apakah Ibu/Bapak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?... (%)



MEMBAYAR PPh (BASE: PUNYA NPWP)

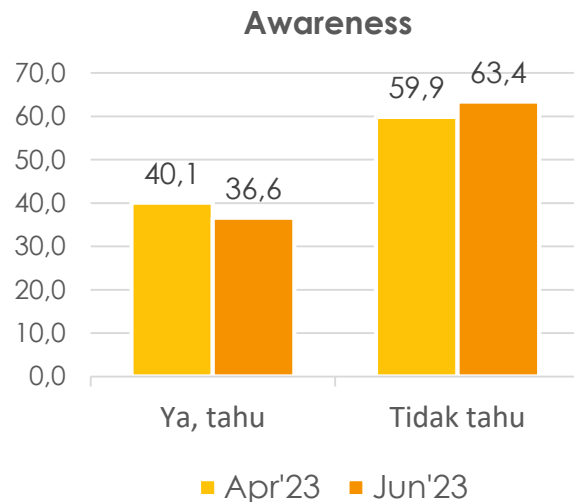
Apakah Ibu/Bapak membayar Pajak Penghasilan (PPh) (baik orang pribadi ataupun badan), baik secara langsung atau melalui perusahaan tempat Ibu/Bapak bekerja? ... (%)



Mayoritas dari yang punya NPWP membayar PPh (74.7%).

KASUS & KEPERCAYAAN TERHADAP DJP

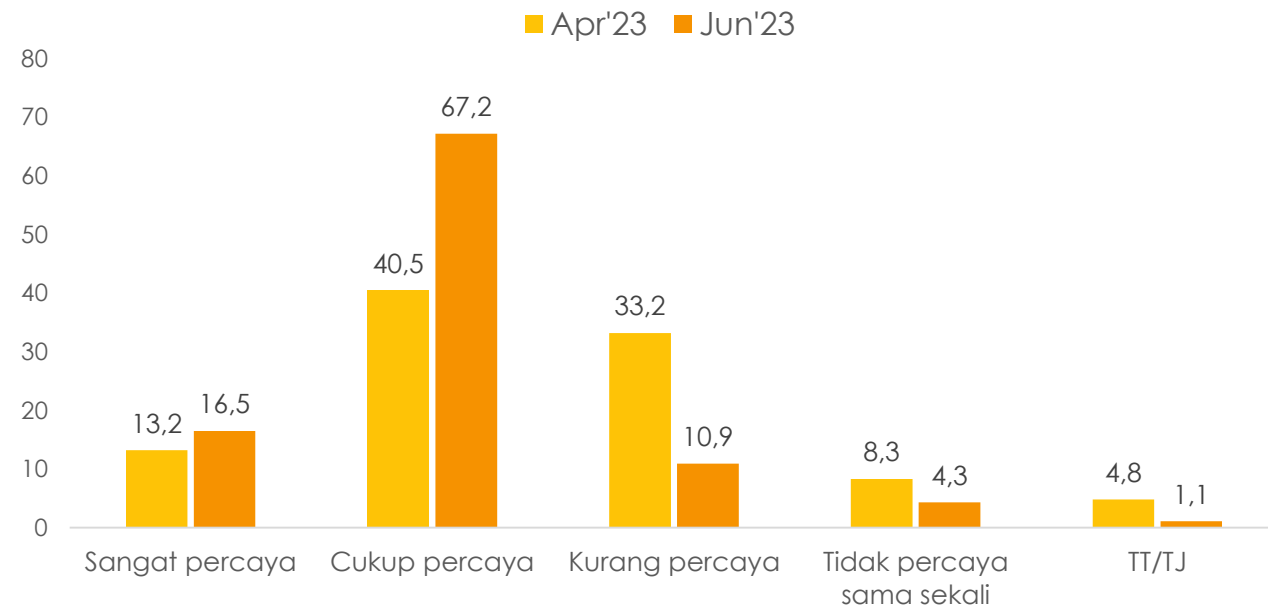
Apakah Ibu/Bapak tahu/penah dengar berita tentang mantan pegawai pajak (Rafael Alun Trisambodo/RAT) yang memiliki harta kekayaan sangat besar di luar harta yang dilaporkannya kepada negara? ... (%)



Sekitar 36.6% tahu kasus Rafael Alun, cenderung menurun ketimbang dua bulan sebelumnya.

Ada yang berpendapat bahwa kasus oknum mantan pegawai pajak tersebut akan membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada lembaga perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak/DJP). Bagaimana dengan Ibu/Bapak sendiri, apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali dengan lembaga perpajakan (DJP) dalam mengelola hasil pajak?... (%)

[Base: tahu kasus Rafael Alun]



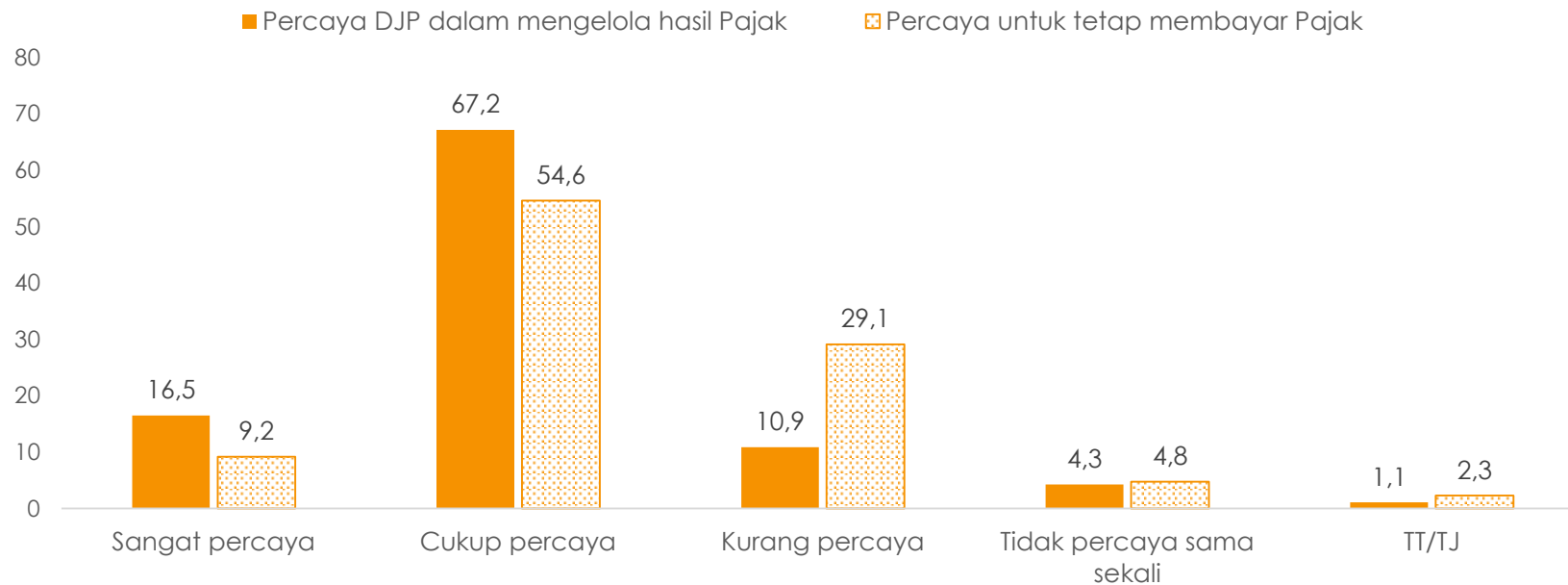
Di antara yang tahu kasus, kepercayaan terhadap DJP dalam mengelola hasil pajak meningkat signifikan dibanding dua bulan lalu.

DAMPAK KASUS RAT

Ada yang berpendapat bahwa kasus oknum mantan pegawai pajak tersebut akan membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada lembaga perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak/DJP). Bagaimana dengan Ibu/Bapak sendiri, apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali dengan lembaga perpajakan (DJP) dalam mengelola hasil pajak?... (%)

Bagaimana dengan Ibu/Bapak sendiri, apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali untuk tetap membayar kewajiban pajak?... (%)

[Base: tahu kasus Rafael Alun]



Di antara yang tahu kasus, mayoritas tetap percaya DJP dalam mengelola hasil pajak, dan mayoritas juga percaya untuk tetap membayar kewajiban pajak, tapi ada gap yang cukup besar, sekitar 20%. Percaya kepada DJP tidak lantas percaya untuk tetap membayar pajak.



KASUS RAT DAN DAMPAKNYA MENURUT DEMOGRAFI

	Base	AWARENESS KASUS RAT		PERCAYA DJP			PERCAYA TETAP BAYAR PAJAK		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
GENDER									
Laki-laki	49.5	39.0	61.0	84.5	15.5	0.0	62.5	35.7	1.8
Perempuan	50.5	34.4	65.6	82.9	14.8	2.2	65.2	31.8	3.0
USIA									
<= 21 tahun	12.6	42.3	57.7	85.3	14.7	0.0	37.5	62.5	0.0
22 - 25 tahun	9.6	37.0	63.0	86.5	13.5	0.0	73.0	27.0	0.0
26 - 40 tahun	36.8	39.0	61.0	85.3	13.3	1.4	65.0	31.9	3.0
41 - 55 tahun	25.2	36.7	63.3	82.0	16.0	2.1	68.1	27.8	4.1
> 55 tahun	15.7	26.4	73.6	77.9	22.1	0.0	76.0	23.0	1.0
ETNIS									
Jawa	40.3	38.3	61.7	79.7	18.6	1.6	69.1	28.9	2.0
Sunda	16.0	35.4	64.6	87.3	12.7	0.0	60.0	37.4	2.6
Batak	3.6	31.7	68.3	89.6	10.4	0.0	58.7	31.2	10.1
Madura	3.2	30.4	69.6	100.0	0.0	0.0	38.4	61.6	0.0
Betawi	3.0	71.5	28.5	75.0	25.0	0.0	39.7	60.3	0.0
Minang	2.9	35.0	65.0	98.8	1.2	0.0	5.3	94.7	0.0
Bugis	2.5	50.6	49.4	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
Melayu	2.4	24.0	76.0	74.7	25.3	0.0	62.9	30.3	6.8
Lainnya	26.2	32.4	67.6	84.6	13.8	1.6	67.8	29.3	2.9
AGAMA									
Islam	87.0	37.2	62.8	84.2	15.0	.8	65.2	32.6	2.2
NU	52.9	36.2	63.8	78.2	20.8	1.1	69.3	29.7	1.0
Muhammadiyah	4.3	45.6	54.4	86.2	13.8	0.0	74.3	20.9	4.8
Ornis Lainnya	1.1	42.8	57.2	82.0	18.0	0.0	47.0	53.0	0.0
Bukan bagian Ornis	38.3	34.7	65.3	90.0	9.4	.6	53.9	43.0	3.1
TJ	3.5	66.6	33.4	100.0	0.0	0.0	91.7	2.3	6.0
Lainnya	13.0	33.2	66.8	80.1	16.7	3.2	53.3	43.5	3.2

KASUS RAT DAN DAMPAKNYA MENURUT DEMOGRAFI

	Base	AWARENESS KASUS RAT		PERCAYA DJP			PERCAYA TETAP BAYAR PAJAK		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
PENDIDIKAN									
<= SD	36.9	17.8	82.2	80.2	18.7	1.1	81.1	15.3	3.6
SLTP	18.5	35.7	64.3	86.2	12.7	1.1	46.5	50.8	2.7
SLTA	30.9	44.2	55.8	81.4	17.9	.8	60.5	37.3	2.2
Kuliah	13.7	71.4	28.6	87.7	10.9	1.4	68.4	30.2	1.4
PEKERJAAN									
Petani/peternak/nelayan	12.6	20.8	79.2	88.7	11.3	0.0	66.2	32.2	1.6
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	31.9	34.6	65.4	86.0	13.3	.7	67.0	31.4	1.6
Wiraswasta, pengusaha	7.2	52.9	47.1	82.9	17.1	0.0	68.9	26.1	4.9
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.2	60.2	39.8	80.0	20.0	0.0	54.8	43.3	1.9
Ibu Rumah Tangga	28.9	30.5	69.5	86.4	11.6	2.0	66.9	30.9	2.3
Masih sekolah/kuliah	4.9	39.0	61.0	86.9	13.1	0.0	39.3	60.7	0.0
Lainnya	4.3	53.6	46.4	66.0	28.1	5.9	69.5	24.6	5.9
PENDAPATAN									
< 1 juta	20.1	22.9	77.1	71.2	24.2	4.6	74.9	20.5	4.6
1 - < 2 juta	33.7	29.9	70.1	83.0	16.4	.6	66.8	32.8	.4
2 - < 4 juta	32.6	42.0	58.0	84.2	14.9	.9	62.5	34.5	3.0
=> 4 juta	13.7	60.5	39.5	90.8	9.2	0.0	56.1	41.5	2.4

KASUS RAT DAN DAMPAKNYA MENURUT WILAYAH

	Base	AWARENESS KASUS RAT		PERCAYA DJP			PERCAYA TETAP BAYAR PAJAK		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ	Percaya	Tidak percaya	TT/TJ
DESA/KOTA									
Pedesaan	49.8	24.2	75.8	81.5	17.4	1.1	59.1	37.7	3.2
Perkotaan	50.2	49.0	51.0	84.9	14.1	1.0	66.1	32.0	1.9
WILAYAH									
SUMATERA	20.4	31.5	68.5	88.3	11.7	0.0	56.4	41.9	1.8
BANTEN	4.3	56.4	43.6	88.4	8.6	3.0	34.5	62.5	3.0
DKI	4.1	84.6	15.4	86.0	12.6	1.3	36.7	62.0	1.3
JABAR	17.4	37.3	62.7	85.4	14.6	0.0	73.5	24.2	2.3
JATENG DIY	16.1	33.4	66.6	76.9	23.1	0.0	76.5	22.7	.8
JATIM	16.2	39.8	60.2	80.0	17.9	2.1	57.6	40.0	2.4
BALI NUSA	5.3	40.0	60.0	79.3	20.7	0.0	77.5	22.5	0.0
KALIMANTAN	5.9	10.5	89.5	100.0	0.0	0.0	74.8	19.0	6.3
SULAWESI	7.0	27.2	72.8	88.5	11.5	0.0	90.9	3.5	5.6
MALUKU PAPUA	3.3	41.9	58.1	78.2	12.0	9.8	86.9	3.2	9.8

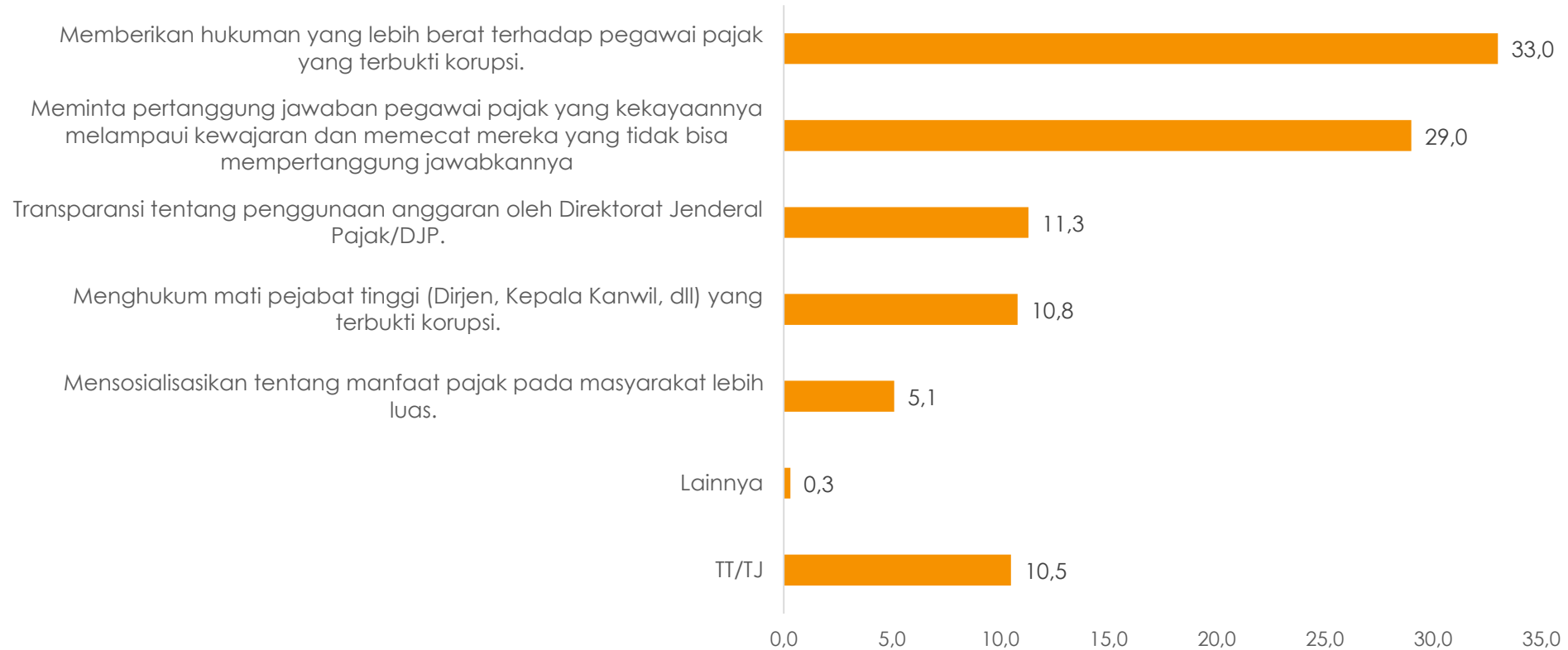
Awareness kasus lebih banyak dari kelompok laki-laki, usia semakin muda, pendidikan dan pendapatan semakin tinggi, terutama kalangan pegawai dan wiraswasta, di perkotaan, dan terutama wilayah DKI Jakarta, Banten, Maluku Papua dan Bali Nusa.

Di antara yang mengetahui, mayoritas percaya terhadap DJP dalam mengelola hasil pajak di setiap kelompok demografi dan wilayah.

Sementara tingkat kepercayaan untuk tetap membayar pajak, di antara yang mengetahui kasus, kelompok usia muda, etnis Betawi, Madura dan Minang, pendidikan SLTP, dan terutama wilayah DKI Jakarta dan Banten, mayoritas tidak percaya untuk tetap membayar pajak.

HAL YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA DJP

Diantara beberapa hal berikut apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak/DJP untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? ... (%)



Agar kepercayaan publik kembali pulih, maka terutama hukuman terhadap pegawai pajak yang terbukti korupsi harus diperberat (33.%) dan, meminta pertanggung jawaban pegawai pajak yang kekayaannya melampaui kewajiban, jika tidak maka dipecat (29%).

KESIMPULAN

KESIMPULAN

KONDISI UMUM

- Kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi keamanan, kondisi penegakan hukum, dan kondisi pemberantasan korupsi, lebih banyak yang menilai positif ketimbang negatif, dan secara umum trennya tampak cenderung stabil.
- Kondisi pemberantasan korupsi lebih banyak yang menilai negatif ketimbang positif pada kelompok usia muda, etnis Batak, Betawi dan Minang, pendidikan dan pendapatan menengah atas, kalangan pegawai, wiraswasta dan ibu rumah tangga, dan terutama di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

KESIMPULAN

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA

- Secara umum, mayoritas warga cukup atau sangat percaya terhadap Lembaga-lembaga negara. Paling tinggi terhadap TNI (95.8%) dan Presiden (92.8%). Kemudian Kejaksaan Agung (81.2%), Polri (76.4%), KPK (75.7%), MPR (73.8%), DPD (73.3%), DPR (68.5%) dan Partai Politik (65.3%).
- Secara umum tren tingkat kepercayaan cenderung mengalami peningkatan dibanding temuan sebelumnya, terutama Polri dan KPK pada kelompok Lembaga penegak hukum.
- Kejaksaan Agung dinilai paling tinggi tingkat kepercayaannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tapi Polri tampak mengalami peningkatan terbesar dibanding temuan sebelumnya, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

KEPOLISIAN

- Mayoritas merasa cukup atau sangat puas (lebih dari 60%) atas kinerja Kepolisian dalam berbagai persoalan. Kepuasan paling rendah dalam pemberantasan Narkoba (62.7%).
- Sekitar 29.8% warga mengetahui tentang anggota Polri yang mengabdikan melebihi panggilan tugasnya, seperti menjadi guru bagi anak yang kurang mampu, menjadi guru ngaji, membangun rumah ibadah/panti asuhan, dll. Di antara yang mengetahui, sekitar 28.7% juga mengetahui bahwa mereka berada di lingkungan sekitar warga. Keberadaan mereka yang mungkin hanya di sekitar 8%, tapi kisahnya terdengar hingga sekitar 29-30% warga nasional.
- Kasus perdagangan orang terhadap 26 orang WNI di Myanmar diketahui oleh sekitar 26% warga, di antara yang mengetahui mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Kepolisian dalam memberantas TPPO, 67.7%.
- Aplikasi SINAR dan SIGNAL, cukup banyak diketahui warga, sekitar 1/3 warga nasional mengetahuinya. Di antara yang mengetahui, mayoritas (lebih dari 70%) cukup atau sangat puas dengan layanan online yang disediakan Kepolisian tersebut.

KESIMPULAN

LANJUTAN ...

- Selain layanan perpanjangan SIM dan pajak kendaraan online yang disediakan, Kepolisian juga menyediakan layanan SKCK online, meski tingkat pengetahuannya lebih rendah ketimbang layanan SINAR dan SIGNAL, tapi tingkat kepuasan layanan SKCK online jauh lebih tinggi ketimbang SINAR dan SIGNAL, lebih dari 85% kelompok yang mengetahui layanan SKCK Online (22.8%) merasa cukup atau sangat puas.
- Hampir semua warga menilai hubungan TNI-Polri baik atau sangat baik (91.8%), dan cenderung semakin positif dibanding temuan sebelumnya.
- Mayoritas warga juga cukup atau sangat percaya Kepolisian mampu melakukan pembersihan internal, 69.7%. Dan harapan warga terhadap Polri ke depan terutama peningkatan kinerja dan profesionalitas, ini termasuk dalam mengayomi dan memberi rasa aman kepada warga, dan adil dalam menegakkan hukum.

KESIMPULAN

KEJAKSAAN AGUNG

- Dibanding Lembaga penegak hukum lain, Kejaksaan Agung paling tinggi tingkat kepercayaannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
- Konsisten dengan tingkat kepercayaan publik, warga juga cenderung menolak adanya keinginan untuk membatasi kewenangan Kejaksaan, yaitu hanya menuntut kasus korupsi saja. Mayoritas warga mendukung Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi, 66.4%.
- Isu dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menkominfo Johny G. Plate, yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, diketahui oleh sekitar 22% warga. Di antara yang mengetahui, sekitar 80.4% percaya Johny G. Plate melakukan korupsi.
- Sekitar separuh warga yang mengetahui menilai bahwa isu tersebut murni persoalan hukum (50.4%) ketimbang isu yang lebih bermuatan politik (36.3%).

KESIMPULAN

DJP

- Isu besar yang menimpa institusi perpajakan belakangan cukup besar menarik perhatian warga nasional. Berawal dari kasus kriminal yang kemudian berkembang ke arah gaya hidup super mewah sang pelaku, belakangan pelaku diketahui merupakan anak dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT).
- Kemudian diketahui bahwa RAT memiliki harta kekayaan yang tidak wajar di luar harta kekayaannya yang dilaporkan sebagai penyelenggara negara. Isu ini sangat krusial karena bisa mempengaruhi pendapatan utama negara, yaitu yang bersumber dari perpajakan.
- Kasus kepemilikan harta kekayaan yang sangat besar di luar harta yang dilaporkan kepada negara ini diketahui oleh sekitar 36.6% warga nasional. Awareness warga cenderung sedikit menurun dibanding temuan dua bulan lalu.
- Di antara warga yang mengetahui, mayoritas tetap percaya terhadap DJP sebagai institusi yang mengelola hasil pajak (bahkan tingkat kepercayaannya meningkat signifikan), dan mayoritas juga masih percaya untuk tetap membayar kewajiban pajaknya.

KESIMPULAN

LANJUTAN ...

- Namun demikian, tampak ada gap yang sangat besar antara tingkat kepercayaan dengan kepatuhan untuk tetap membayar kewajiban pajak, sekitar 20%. Percaya terhadap DJP tidak lantas juga berarti percaya untuk tetap membayar pajak.
- Ke depan, pendapatan utama negara, yaitu sektor perpajakan, sangat potensial mengalami penurunan. Oleh karena itu, kepercayaan publik untuk tetap membayar pajak harus dipulihkan.
- Menurut kebanyakan warga, menghukum lebih berat pegawai pajak yang terbukti korupsi (33%) dan memecat pegawai pajak yang tidak bisa mempertanggung jawabkan kekayaannya yang melampaui kewajiban (29%), merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh DJP untuk memulihkan kepercayaan publik.

TERIMA KASIH



Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Pusat
Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867
Website: www.indikator.co.id